



LAPORAN PENDAHULUAN

KAJIAN PENYUSUNAN INDEKS KESENJANGAN WILAYAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025



KERJA SAMA:



Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Pasuruan

Bekerja sama dengan:



Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Brawijaya

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	12
BAB II KAJIAN LITERATUR	15
2.1. Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi.....	15
2.1.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi	15
2.1.2. Teori Pembangunan Ekonomi	17
2.1.3. Teori Pembangunan Ekonomi Daerah.....	19
2.1.4. Pembangunan Ekonomi Regional	20
2.2. Kesenjangan Wilayah	22
2.2.1. Produk Domestik Regional Bruto.....	23
2.2.2. Konsumsi Rumah Tangga	25
2.2.3. Distribusi Pendapatan	29
2.3. Kesenjangan Pembangunan Regional.....	29
2.4. Peran Spasial Dalam Pembangunan Ekonomi.....	32
2.4.1. Teori Tempat Sentral (<i>Central Place Theory</i>)	39
2.4.2. Teori Kutub Pertumbuhan (<i>Growth Pole Theory</i>).....	41
2.4.3. Teori Konvergen (<i>Convergence Theory</i>).....	42
2.4.4. Teori Divergen (<i>Divergence Theory</i>).....	44
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1. Pendekatan Penelitian	45
3.2. Diagram Alir Penelitian	46
3.3. Jenis dan Sumber Data	47
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.5. Data-data yang Dibutuhkan	48
3.6. Metode Analisis.	48

3.6.1. Indeks Williamson	49
3.6.2. Koefisien Gini	49
3.6.3. Kurva Lorentz	50
3.6.4. Analisis SEM PLS (<i>Structural Equation Modeling – Partial Least Squares</i>)	51
3.6.5. Analisis Deskriptif Interpretatif	54
3.6.6. Analisis IFAS-EFAS.....	54
3.7. Rencana Kerja Pelaksanaan Kegiatan.....	60
 BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN PASURUAN	62
4.1. Aspek Geografis	62
4.2. Aspek Perekonomian.....	64
4.2.1. Perkembangan Makro Ekonomi Kabupaten Pasuruan.	64
4.2.2. Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Pembangunan Wilayah Kabupaten Pasuruan.	66

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Tabel

Tabel 3. 1	Kebutuhan Data Sekunder dan Sumber Data.....	48
Tabel 3. 2	Variabel Eksogen dalam Kesenjangan Wilayah Kabupaten Pasuruan.....	52

Daftar Gambar

Gambar 1.1	PDRB/Kapita Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2011 - 2024.....	3
Gambar 1.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 - 2024	4
Gambar 1.3	IPM Kabupaten Pasuruan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2010 - 2024	6
Gambar 1.4	Gini Rasio dan Willamson Kabupaten Pasuruan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2014 - 2024	7
Gambar 3. 1	Tahapan Penelitian.....	46
Gambar 3.2.	Diagram IFAS-EFAS.....	58
Gambar 4.1	Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Pasuruan.	62
Gambar 4.2	Jarak Wilayah Kecamatan ke Pusat Wilayah Kabupaten Pasuruan.	63
Gambar 4.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional, 2011 – 2024	64
Gambar 4.4	Perkembangan Pendapatan Per Kapita Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional, 2011 – 2024.....	65
Gambar 4.5.	Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional, 2012-2024	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah yang di gadang-gadang sejak tahun 1999 menjadi pemicu pembangunan inklusif hingga tingkat pemerintahan terbawah. Hal ini tertuang dalam Undang-undang No. 22 dan 25 Tahun 1999 tentang dana perimbangan, dan di amandemen menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, serta di amandemen kembali menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Atas dasar undang-undang tersebut, daerah di beri kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik, tanpa banyak intervensi dari pusat (Suparto, 2017).

Harapan besar dari pemerintah pusat atas munculnya konsep otonomi daerah tidak lain adalah (Badan Pengkajian MPR RR, 2018):

1. Meringankan beban pemerintah pusat. Dengan mendelegasikan sebagian tugas, pemerintah pusat dapat lebih fokus pada kebijakan berskala nasional dan mendasar.
2. Meringankan partisipasi politik. Memberikan ruang bagi masyarakat di daerah untuk lebih aktif dalam pengelolaan pemerintahan.
3. Mengembangkan daerah secara optimal. Memungkinkan setiap daerah untuk memanfaatkan potensi lokalnya secara efisien dan merancang kebijakan yang sesuai dengan karakteristik daerahnya.

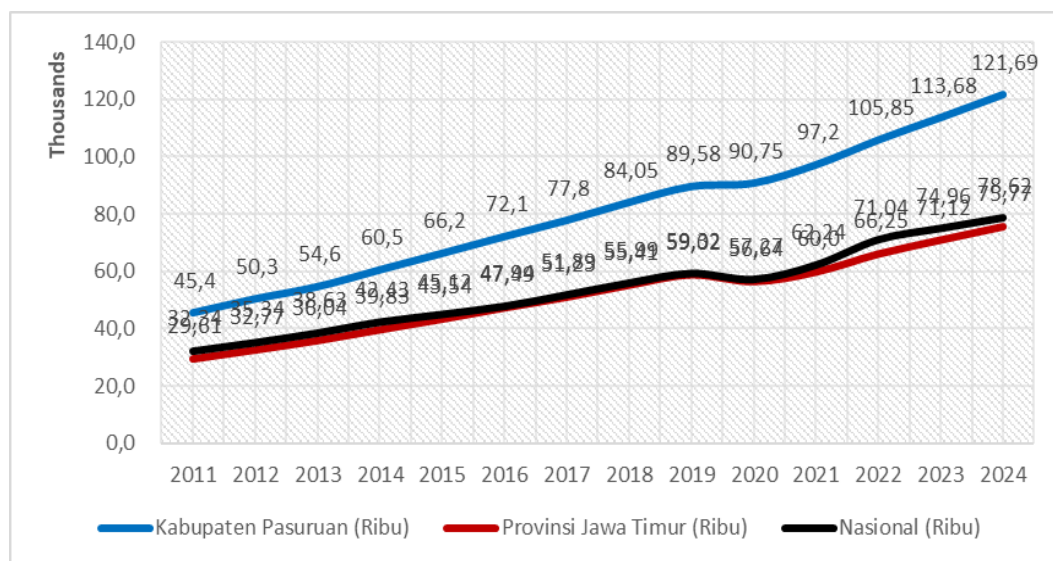
Beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah adalah kualitas sumber daya manusia, potensi ekonomi daerah, kemampuan struktur organisasi, serta dukungan politik nasional (Gladisya, Sihombing, dan Silvia, 2022).

Pembangunan daerah yang diamanatkan oleh pemerintah pusat, tentu akan hanya menjadi sebuah *utopia* jika tidak dibarengi dengan penguatan di beberapa sektor. Pernyataan tersebut sesuai dengan beberapa fakta-fakta yang terjadi pasca ditetapkannya otonomi daerah, diantaranya (Pratama, dkk. 2025):

1. Keterbatasan sumberdaya. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) yang terampil menjadi hambatan utama dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik.
2. Tumpang tindih kewenangan. Sering terjadi tumpang tindih dan ketidakjelasan antara kewenangan pemerintah pusat dan daerah, yang menghambat kinerja.
3. Ketergantungan fiskal. Banyak daerah masih sangat bergantung pada dana dari pemerintah pusat, yang membatasi kemandirian daerah dalam mengelola anggaran dan pembangunan.
4. Korupsi. Munculnya kasus korupsi oleh oknum di tingkat daerah menjadi masalah serius yang merusak implementasi otonomi daerah.
5. Buruknya koordinasi. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sering kali tidak optimal, yang menyebabkan hambatan dalam alokasi dana dan pelaksanaan kebijakan.
6. Rendahnya partisipasi masyarakat. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik di daerah
7. Ketimpangan pembangunan. Terjadi kesenjangan pembangunan antar daerah, di mana daerah yang kaya cenderung lebih maju sementara yang miskin tertinggal.
8. Tantangan globalisasi. Daerah perlu beradaptasi dengan persaingan global yang semakin ketat dan masalah lingkungan global seperti perubahan iklim.

Guna mengoptimalkan pembangunan inklusif sesuai cita-cita pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Pasuruan sejak tahun 2018 melakukan kajian tentang indeks kesenjangan wilayah. Kajian ini menjadi penting lantaran masing-masing kecamatan di Kabupaten Pasuruan memiliki potensi yang beragam dan harus dikaji lebih lanjut guna mengoptimalkan kebijakan (lebih tepat sasaran) sehingga pembangunan inklusif dapat terlaksana dengan baik.

Kajian untuk mencapai Pembangunan inklusif tentu saja dimulai dari analisis beberapa fakta dan data yang dapat dijadikan indikator kinerja dan capaian daerah. Diliat dari perkembangan PDRB/Kapita, Kabupaten dari tahun 2011 hingga 2024 selalu berada posisi teratas jika dibanding dengan Provinsi Jawa Timur maupun Nasional (Gambar 1.1).



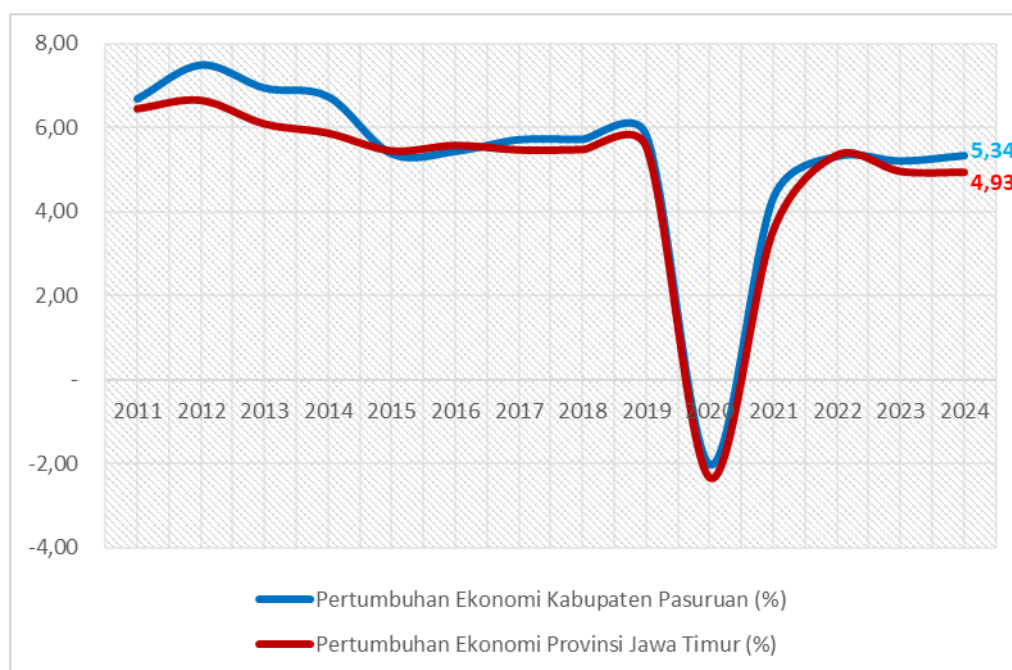
Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Gambar 1.1 PDRB/Kapita Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2011 - 2024

Dari gambar 1.1 dapat dipahami bahwa pada tahun 2011 PDRB/kapita Kabupaten Pasuruan berada di angka 45,4 (dalam ribu). Hal ini berada diatas Provinsi Jawa Timur yaitu 29,61 (dalam ribu) dan Nasional yaitu 32,34 (dalam ribu). Perkembangan PDRB/Kapita Kabupaten Pasuruan terus berada di atas

provinsi dan nasional bahkan mengalami peningkatan hingga tahun 2024. Pada tahun 2024 posisi PDRB/Kapita Kabupaten Pasuruan masih berada di atas provinsi maupun nasional. Dimana Kabupaten Pasuruan di angka 121,69 (dalam ribu) sedangkan provinsi di angka 75,77 (dalam ribu) dan nasional di angka 78,61 (dalam ribu).

Bukan hanya PDRB/Kapita yang menunjukkan perkembangan cukup bagus di Kabupaten Pasuruan, beberapa indikator makro seperti: (i) laju pertumbuhan ekonomi; (ii) IPM; (iii) tingkat kemiskinan; (iv) gini rasio; (v) pengangguran; dan (vi) Indeks Kesenjangan Wilayah juga menunjukkan nilai yang cukup bagus. Di lihat dari laju pertumbuhan ekonomi, dari tahun 2011 hingga 2024, Kabupaten Pasuruan rata-rata angkanya (walaupun angkanya sedikit fluktuatif) berada diatas provinsi (lihat gambar1.2).



Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Gambar 1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 - 2024

Gambar 1.2 dapat dipahami bahwa pada tahun 2011, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan berada di angka 6,69% sedangkan Provinsi Jawa

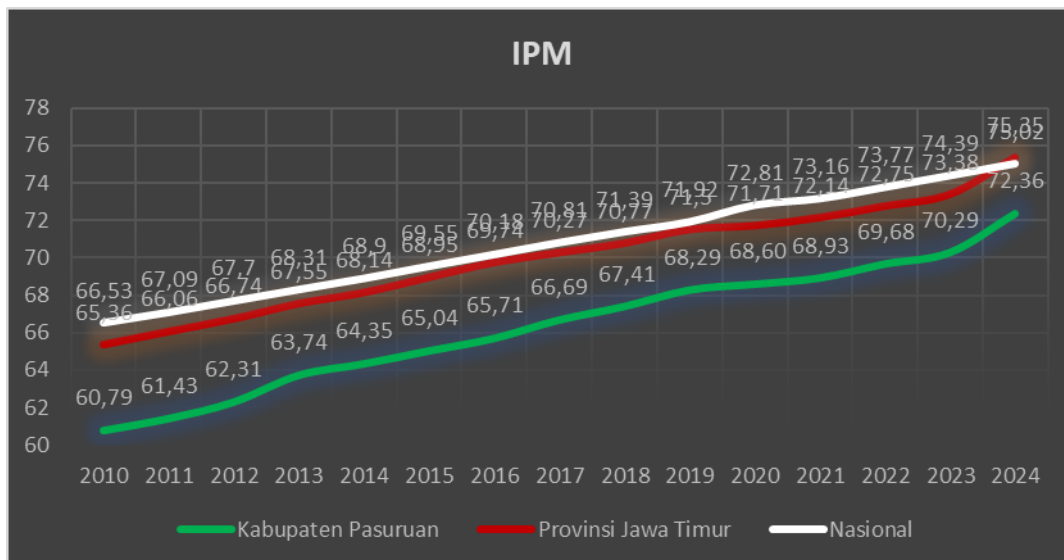
Timur 6,44%. Angka laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan ini mengalami peningkatan di tahun 2012 menjadi 7,50% sedangkan Provinsi Jawa Timur 6,64%. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan menunjukkan trend menurun di tahun 2012 hingga tahun 2015, dan mengalami sedikit peningkatan hingga tahun 2019.

Penurunan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 2012 hingga tahun 2015 tidak lain karena adanya pelambatan laju ekspor dan penurunan daya beli masyarakat. Pada tahun 2019 hingga 2020, secara global pertumbuhan ekonomi mengalami tekanan signifikan lantaran adanya pandemi Covid-19. Guncangan ini juga turut dirasakan oleh sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Pasuruan. Laju pertumbuhan ekonomi menurun drastis mencapai -2,03%. Sektor-sektor ekonomi banyak yang berhenti beroperasi, daya beli masyarakat menurun, kendala pemasaran serta rantai pasok bahan baku terhambat. Dampak terbesarnya adalah tingginya angka PHK yang mencapai 4.481 orang (Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan, 2021).

Akan tetapi, pada tahun 2021, kondisi ekonomi mulai menunjukkan perbaikan. Sektor-sektor produktif mulai bergeliat karena pemasaran dan rantai pasok bahan baku dapat berjalan dengan baik. Tak heran, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan mencapai 4,34%. Angka ini terus meningkat hingga 2024 mencapai 5,34% atau berada di atas Provinsi Jawa Timur yang berada di angka 4,93%.

Indikator makro berikutnya yang digunakan untuk melihat capaian kinerja pembangunan di Kabupaten Pasuruan yaitu IPM (Indeks Pembangunan Manusia). IPM merupakan ukuran komposit yang mengukur pencapaian di tiga bidang dasar: (i) umur panjang dan sehat; (ii) pengetahuan; serta (iii) standar hidup yang layak (BPS, 2024). Indeks ini diterbitkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) dan digunakan untuk menilai pembangunan manusia di

suatu wilayah, yang tercermin dari nilai IPM yang tinggi (BPS, 2014). Dalam hal IPM, dari tahun 2010 hingga 2024 Kabupaten Pasuruan selalu berada di bawah Provinsi Jawa Timur maupun Nasional (Gambar 1.3). Akan tetapi, nilai IPM dari tahun ke tahun untuk Kabupaten Pasuruan selalu menunjukkan peningkatan.



Sumber: BPS, 2025 (diolah)

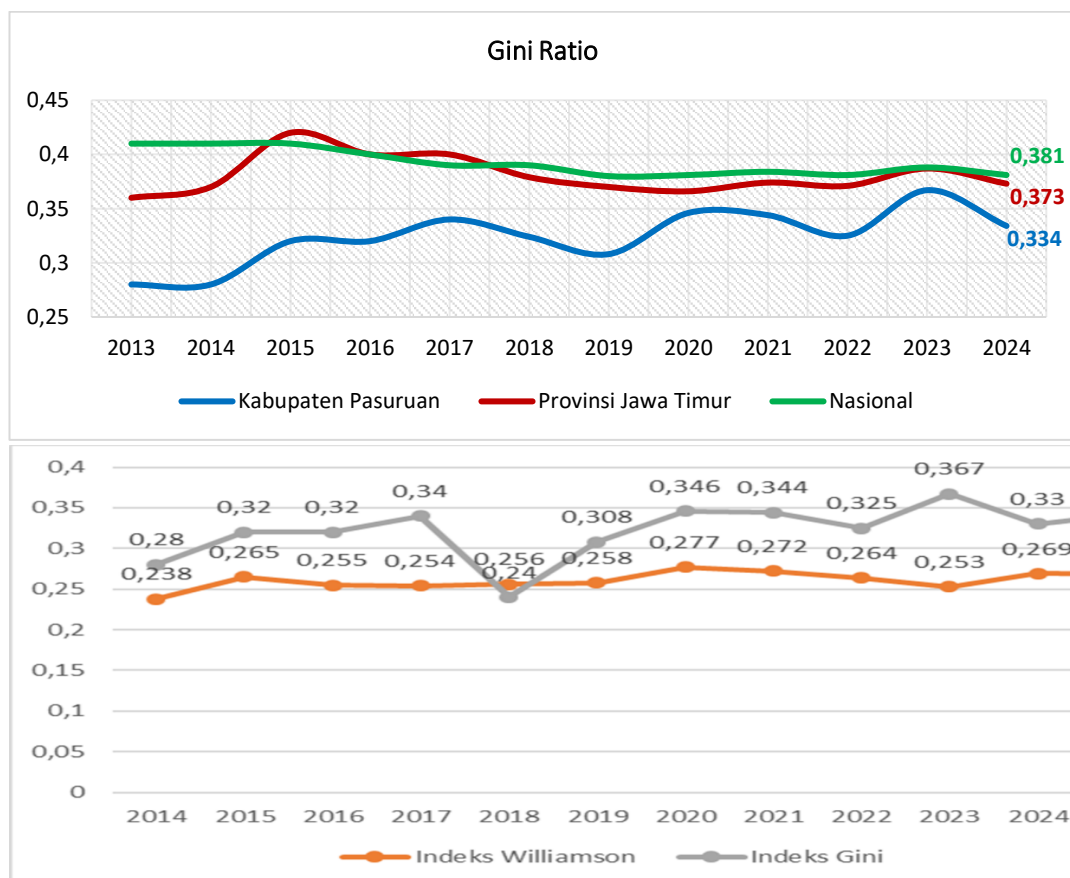
Gambar 1.3 IPM Kabupaten Pasuruan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2010 - 2024

Dari gambar 1.3 dapat dipahami bahwa pada tahun 2010 nilai IPM Kabupaten Pasuruan berada di angka 60,79%. Sedangkan Provinsi Jawa Timur berada di angka 65,36% dan Nasional 66,53%. Angka ini tiap tahun selalu meningkat hingga tahun 2024. Dimana untuk Kabupaten Pasuruan berada di angka 72,36%, Provinsi Jawa Timur berada di angka 75,35%, dan Nasional berada di angka 72,02%. Indikator makro dari IPM tersebut walaupun nilainya terus meningkat setiap tahun, akan tetapi perlu menjadi penanda dan bahan evaluasi bagi Kabupaten Pasuruan untuk lebih meningkatkan kinerjanya sehingga nilainya mampu melampaui Provinsi Jawa Timur maupun Nasional.

Berikutnya, yang menjadi salah satu indikator pembangunan daerah yaitu dapat dilihat dari kesenjangan individu penduduk (Gini Rasio/Indeks Gini). Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan pendapatan atau kekayaan dalam suatu wilayah,

dengan nilai antara 0 (pemerataan sempurna) hingga 1 (ketimpangan sempurna) (BPS, 2014). Indeks Gini bisa diartikan sebagai ukuran pemerataan distribusi hasil pembangunan (pemerataan distribusi kue ekonomi) antar penduduk di suatu negara atau wilayah (Todaro, 2018) Nilai yang lebih mendekati 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih merata, sementara nilai yang mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang lebih besar. Indeks ini sering digunakan untuk mengukur kesenjangan ekonomi di antara penduduk suatu negara atau kelompok sosial (World Bank, 2020).

Berdasar nilai indeks gini di Kabupaten Pasuruan dari tahun 2014 hingga 2023 menunjukkan trend fluktuatif dan selalu meningkat (gambar 1.4). Artinya tingkat kesenjangan antar penduduk di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan.



Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Gambar 1.4 Gini Rasio dan Willamson Kapubaten Pasuruan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2014 - 2024

Indeks Gini di Kabupaten Pasuruan berdasar gambar 1.4 dari tahun 2014 hingga 2023 memang menunjukkan trend yang cenderung meningkat. Akan tetapi nilai indeks gini masih masuk kategori rendah (nilainya di bawah 0,4) dan selalu berada di bawah Provinsi Jawa Timur maupun nasional. Bahkan pada tahun 2024, angka indeks gini di Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan cukup tajam yaitu 0,334 (rendah). Sedangkan Provinsi Jawa Timur berada di angka 0,373 (rendah) dan nasional berada di angka 0,381 (rendah).

Indikator berikutnya yang di pakai untuk melihat capaian kinerja Kabupaten Pasuruan adalah Indeks Kesenjangan Wilayah (Williamson). Indeks Williamson adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan pembangunan ekonomi antar wilayah dalam suatu daerah, seperti antar kabupaten atau kota dalam sebuah provinsi (Todaro, 2018). Nilai indeks ini berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai mendekati 1 menunjukkan kesenjangan yang besar, sedangkan mendekati 0 menunjukkan kesenjangan yang kecil atau pembangunan yang lebih merata. Indeks ini membantu mengevaluasi ketimpangan distribusi pendapatan dan konsentrasi kemiskinan, yang dapat menjadi dasar perumusan kebijakan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil.

Gambar 1.4 menunjukkan bahwa Indeks Willamson di Kabupaten Pasuruan dari tahun 2014 hingga 2024 menunjukkan trend yang cenderung stabil dan masuk kategori rendah. Pada tahun 2014, Indeks Willamson Kabupaten Pasuruan berada di angka 0,238 mengalami sedikit peningkatan di tahun 2015 menjadi 0,265, sedikit menurun di tahun 2016 menjadi 0,255 dan trendnya meningkat pada tahun 2019 menjadi 0,258, meningkat kembali pada tahun 2020 menjadi 0,277, bahkan stabil hingga tahun 2024 menjadi 0,269. Angka tersebut dari tahun 2014 hingga 2024 masih masuk dalam kategori rendah.

Memang, dari tahun ke tahun beberapa indikator makro di Kabupaten Pasuruan menunjukkan trend yang sangat bagus dibanding dengan Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Akan tetapi, indikator-indikator yang bagus tersebut bukan semakin membuat Kabupaten Pasuruan menjadi terlena. Justru dengan adanya indikator yang bagus semakin menjadi pemicu kinerja daerah untuk meningkatkan motivasi agar beberapa indikator tersebut semakin dipertahankan atau bahkan semakin di tingkatkan. Untuk itu, pada tahun 2025 ini, Kabupaten Pasuruan menjalin kerja sama dengan Universitas Brawijaya menyusun kajian tentang indeks kesenjangan wilayah di Kabupaten Pasuruan. Kajian ini dirasa sangat penting guna mengetahui secara detail terkait pemerataan pembangunan hingga kecamatan.

Data-data yang digunakan dalam kajian ini adalah data skunder sebagai acuan indikator makro, dan data primer sebagai penguat untuk justifikasi apakah indikator dalam analisis makro tersebut benar-benar sesuai dengan apa yang dialami oleh masyarakat di Kabupaten Pasuruan. Berdasar data BPS 2024, Beberapa faktor penopang pembangunan di Kabupaten Pasuruan diantaranya:

1. Peningkatan konsumsi rumah tangga
2. Industri pengolahan
3. Neraca perdagangan dari sektor pertanian
4. Pembangunan desa

Sedangkan faktor penentu ketimpangan di Kabupaten Pasuruan berdasar kajian ketimpangan wilayah yang dilakukan oleh Universitas Brawijaya dari tahun 2018 hingga 2024 diantaranya:

1. Perbedaan akses pendidikan. Daerah maupun individu masyarakat yang memiliki akses pendidikan lebih baik tentu saja akan lebih maju di banding dengan daerah lainnya.

2. Perbedaan akses ke lapangan kerja. Daerah yang berada di pusat pasar tenaga kerja umumnya akan lebih berkembang dan maju di banding dengan daerah yang sulit memiliki akses ke pasar tenaga kerja.
3. Perbedaan akses kepemilikan sumberdaya. Artinya, daerah dengan kapasitas kepemilikan sumberdaya (manusia maupun alam) yang lebih baik umumnya lebih maju di banding dengan daerah yang minim memiliki kapasitas kepemilikan sumberdaya.
4. Perbedaan sektor ekonomi (tradisional ke modern). Artinya, daerah yang menjalankan roda ekonomi lebih modern umumnya akan lebih berkembang dan maju secara ekonomi dibanding daerah lain yang perekonomiannya dijalankan secara tradisional.
5. Globalisasi dan teknologi. Artinya, daerah yang sumberdayanya telah memanfaatkan teknologi dan mampu masuk ke pasar global (industri ekspor) umumnya memiliki perkembangan ekonomi yang lebih maju di banding dengan daerah yang masih mengandalkan pasar lokal dengan teknologi tradisional.
6. Faktor sosial dan demografi. Faktor ini menjadi penting dimana masyarakat yang memiliki kecenderungan terbuka akan teknologi dan informasi serta dengan tingkat demografi berupa tenaga prdouktif umumnya cenderung lebih maju secara ekonomi dibanding dengan daerah yang minim dengan keterbukaan dan mengalami struktur demografis usia tidak produktif.
7. Kualitas layanan infrastruktur dan geografi. Artinya, kualitas layanan seperti akses jalan, sarana pendidikan, kesehatan, pasar, teknologi infomasi dan pemerintahan menjadi faktor penting dalam meningkatkan pembangunan di daerah. Daerah yang minim akses atau kualitas infrastrukturnya buruk dan terisolasi secara geografi biasanya lebih tertinggal.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasar pada paparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk beberapa pertanyaa diantaranya:

1. Bagaimana potensi pembangunan daerah di Kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimana perhitungan serta nilai indeks Willamson di Kabupaten Pasuruan tahun 2025?
3. Bagaimana hasil perhitungan indeks gini di Kabupaten Pasuruan tahun 2025?
4. Bagaimana bentuk rumusan strategi pembangunan wilayah di Kabupaten Pasuruan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah diantaranya:

1. Mengidentifikasi potensi ekonomi di Kabupaten Pasuruan.
2. Mengestimasi nilai Indeks Williamsom sebagai indikator kesenjangan pembangunan di masing-masing wilayah Kabupaten Pasuruan pada tahun 2025.
3. Mengestimasi nilai Indeks Gini (Gini Ratio) sebagai indikator kesenjangan pendapatan antar penduduk di wilayah Kabupaten Pasuruan pada tahun 2025.
4. Mengestimasi nilai Indeks Gini (Gini Ratio) sebagai indikator kesenjangan pendapatan antar penduduk di wilayah Kabupaten Pasuruan pada tahun 2025.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat utama yang diharapkan dalam penelitian ini berdasar hasil paparan pada latar belakang diatas diantaranya:

1. Manfaat akademis. Penelitian mengenai kesenjangan wilayah memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang ekonomi regional, perencanaan pembangunan wilayah, dan kebijakan fiskal daerah. Secara spesifik:
 - a. Menyediakan kajian empiris tentang tingkat disparitas antar kecamatan di Kabupaten Pasuruan.
 - b. Menjadi referensi ilmiah bagi peneliti lain untuk melakukan studi lanjutan, seperti analisis determinan ketimpangan, pola pertumbuhan spasial, maupun dampak kebijakan fiskal terhadap pemerataan pembangunan.
 - c. Mengembangkan model analisis spasial dan tipologi pembangunan (misalnya *Klassen Typology* atau Indeks Williamson) yang dapat diaplikasikan untuk daerah lain.
2. Manfaat Praktis bagi Pemerintah Daerah. Penelitian ini sangat bermanfaat untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran di tingkat Kabupaten dan kecamatan. Beberapa manfaatnya antara lain:
 - a. Mengidentifikasi kecamatan tertinggal dan maju, serta memetakan faktor penyebab kesenjangan (aksesibilitas, infrastruktur, kualitas SDM, potensi ekonomi).
 - b. Menjadi dasar penyusunan prioritas program pembangunan wilayah, misalnya penguatan infrastruktur di wilayah selatan atau pengembangan sektor industri di wilayah utara.

- c. Mendukung efektivitas kebijakan desentralisasi fiskal, seperti alokasi Dana Desa, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih proporsional berdasarkan kebutuhan riil wilayah.
 - d. Memberikan masukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen RKPD tahunan agar lebih berbasis data dan bukti empiris.
3. Manfaat Ekonomi dan Sosial. Hasil penelitian tentang kesenjangan wilayah berimplikasi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat:
- a. Membantu merancang program pemerataan ekonomi lokal, seperti pengembangan UMKM berbasis potensi wilayah, revitalisasi pasar tradisional, dan peningkatan konektivitas antarwilayah.
 - b. Mendorong pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, khususnya di kecamatan yang tertinggal.
 - c. Mengurangi risiko migrasi internal berlebihan dari wilayah pinggiran ke pusat pertumbuhan, yang sering kali menyebabkan tekanan sosial dan ekonomi di kawasan perkotaan.
4. Manfaat bagi Dunia Usaha dan Investasi.
- a. Memberikan informasi spasial yang jelas mengenai potensi ekonomi unggulan per kecamatan, sehingga memudahkan investor dalam mengambil keputusan.
 - b. Mendorong sinergi antara sektor publik dan swasta dalam pengembangan kawasan industri, pariwisata, pertanian, maupun logistik.
 - c. Menjadi dasar pengembangan klaster ekonomi berbasis sumber daya lokal (misalnya agroindustri di wilayah selatan dan manufaktur di wilayah utara).

5. Manfaat Strategis dan Jangka Panjang

- a. Mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama tujuan ke-8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi) serta tujuan ke-10 (mengurangi ketimpangan).
- b. Menjadi bahan pertimbangan dalam reorientasi kebijakan pembangunan wilayah menuju pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan.
- c. Membantu Kabupaten Pasuruan menyiapkan diri menghadapi transformasi ekonomi daerah berbasis industri, pariwisata, dan pertanian berkelanjutan.

BAB II

KAJIAN LITERATUR

2.1. Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi

Konsep pertumbuhan dan pembangunan ekonomi merupakan dua konsep yang sering digunakan dalam membahas ekonomi. Pembangunan pada dasarnya tidak lepas dari kaidah-kaidah ilmu ekonomi baik secara mikro maupun makro. Pembahasan ilmu ekonomi (*economics*) selalu berkaitan dengan efisiensi dan alokasi sumber-sumber produktif yang langka (*scarcity*), serta pertumbuhan yang optimal dari sumber-sumber tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih besar.

2.1.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi menurut Boediono dalam Tarigan (2007) didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Atau dalam ranah teori dikatakan bahwa ekonomi tumbuh atau berkembang apabila terjadi pertumbuhan output riil perkapita. Menurut Schumpeter dan Hicks dalam Jhingan (2000), ada perbedaan dalam istilah perkembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ekonomi merupakan perubahan spontan dan terputus-putus dalam keadaan stasioner yang senantiasa mengubah dan mengganti situasi keseimbangan yang ada sebelumnya, sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan tabungan dan penduduk.

Hicks mengemukakan masalah negara terbelakang menyangkut pengembangan sumber-sumber yang tidak atau belum dipergunakan, kendati penggunaannya telah cukup dikenal, sedangkan masalah Negara maju terkait pada

pertumbuhan karena kebanyakan dari sumber mereka sudah diketahui dan dikembangkan sampai batas tertentu.

Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi lima tahap yang berurutan yang dimulai dari: (i) masa berburu, (ii) masa berternak, (iii) masa bercocok tanam, (iv) masa perdagangan, dan (v) tahap masa industri. Menurut teori ini masyarakat akan bergerak dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kapitalis. Dalam prosesnya, pertumbuhan ekonomi akan semakin terpacu dengan adanya sistem pembagian kerja antar pelaku ekonomi. Adam Smith memandang pekerja sebagai salah satu input bagi proses produksi dan pembagian tenaga kerja merupakan titik sentral dalam upaya peningkatan produktifitas kerja.

Menurut Simon Kuznets (dalam Todaro 2000) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara (daerah) yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya, yang terwujud dengan adanya kenaikan output nasional secara terus-menerus yang disertai dengan kemajuan teknologi serta adanya penyesuaian kelembagaan, sikap dan ideologi yang dibutuhkannya. Selain itu, menurut Sumitro Djojohadikusumo (1994) pertumbuhan ekonomi berfokus pada proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Untuk melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi tersebut terwujud, maka salah satu indikatornya adalah adanya perubahan PDRB atau PDRB perkapita dari tahun ke tahun. Adapun rumus dalam menentukan tingkat (laju) pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$\text{Laju Pertumbuhan } (\Delta Y) = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana :

$PDRB_t$ adalah PDRB tahun tertentu (tahun t),

$PDRB_{t-1}$ adalah PDRB tahun sebelumnya sebagai pembanding (t-1)

2.1.2. Teori Pembangunan Ekonomi

Dalam Ekonomi Pembangunan, kajian mengenai pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) dan pembangunan ekonomi (*economic development*) menempati posisi yang cukup penting di kalangan para ekonom. Kajian ini setidaknya dimulai ketika ekonom mengamati fenomena-fenomena penting yang dialami dunia dalam dua abad belakangan ini. Perkembangan perekonomian dunia selama dua abad ini telah menimbulkan dua efek yang sangat penting, yaitu : pertama, kemakmuran atau taraf hidup yang semakin meningkat yang dicapai oleh masyarakat dunia, kedua, terciptanya kesempatan kerja baru kepada penduduk yang semakin bertambah jumlahnya. Ekonomi pembangunan pada dasarnya telah melewati tiga fase yang berbeda. Fase *pertama*, adalah Ekonomi Pembangunan klasik yang dikembangkan oleh para ekonom klasik yang mencoba menjelaskan ekonomi jangka panjang dalam kerangka kerja kapitalisme dengan slogannya yang terkenal *laissez faire*. Fase ini bertahan lebih kurang satu abad sejak publikasi *The Wealth of Nation*, karya Adam Smith tahun 1776.

Fase *kedua*, dimulai setelah perang dunia kedua dan ketika sejumlah negara dunia ketiga memperoleh kemerdekaannya. Oleh karena banyak negara-negara yang baru merdeka, maka analisis masalah yang berkenaan dengan negara-negara tersebut mulai menarik perhatian. Pada fase ini fokus perhatian

berpindah dari ekonomi liberalisme klasik kepada Neo Klasik. Strategi yang dipegang adalah ketergantungan yang lebih kecil kepada pasar dan peranan yang lebih besar dari pemerintah dalam perekonomian. Kapitalisme *laissez faire* telah kehilangan peran ketika itu, akibat peristiwa *Great Depression* (1929-1932). Ekonom yang sangat berperan dalam fase ini adalah John Maynard Keynes dengan bukunya *The General Theory of Employment, Interest and Money* yang diterbitkan tahun 1936. Pada fase inilah ekonomi Keynesys dan sosialis memperoleh momentum di dunia Barat.

Sedangkan fase *ketiga* memiliki fokus yang berbeda dengan fase kedua. Dalam fase ketiga ini perhatian Ekonomi Pembangunan cenderung anti kekuasaan (negara) dan kembali pro kepada kebebasan pasar. Fase ini terjadi mulai tahun 1970 an, yaitu ketika pelaksanaan startegi Keynes dan sosialis mulai melemah. Pada fase ini ekonomi neoklasik muali "*comeback*" dan menjadi paradigma yang dominan.

Ketiga fase tersebut, menunjukkan inkonsistensi dan ketidakpastian dalam program pembangunan di negara-negara berkembang, khususnya di negara-negara muslim. Inkonsisten tersebut melahirkan analisis dan resep kebijakan yang bertentangan dan ini sangat membahayakan pembangunan ekonomi negara-negara berkembang. Dengan kata lain, negara-negara berkembang yang hendak melaksanakan pembangunan dengan model barat mengalami kebingungan karena pertentangan-pertentangan konsep antara neo klasik ala Keynes dengan liberalism klasik (ekonomi pasar yang mereduksi peran negara dalam ekonomi) yang diajarkan Adam Smith. Kebingungan negara-negara berkembang itu juga dipengaruhi oleh konsep-konsep pembangunan dari negara-negara yang menerapkan sistem sosialis.

2.1.3. Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Sirojuzilam (2008) mendefinisikan pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat multidimensional, yang melibatkan kepada perubahan besar, baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Adisasmita (2008), pembangunan wilayah (regional) merupakan fungsi dari potensi sumber daya alam, tenaga kerja dan sumber daya manusia, investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, kewirausahaan (kewiraswastaan), kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan (Arsyad, 1999).

Setiap upaya pembangunan daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah dengan menggunakan segenap potensi yang dimilikinya baru. Perbedaan kondisi daerah membawa implikasi

bagi corak pembangunan yang akan diterapkan. Peniruan terhadap pola kebijakan yang berhasil pada suatu daerah, belum tentu memberikan manfaat yang sama bagi daerah lainnya.

Dengan demikian pola kebijakan pembangunan yang diambil oleh suatu daerah harus disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu penelitian yang mendalam tentang keadaan dan potensi tiap daerah harus dilaksanakan untuk mendapatkan data dan informasi yang berguna bagi penentuan arah perencanaan pembangunan daerah yang bersangkutan. Masalah pokok pembangunan daerah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal. Orientasi ini mengarah pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi (Arsyad, 1999).

2.1.4. Pembangunan Ekonomi Regional

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan itu diukur dalam nilai rill, artinya diukur dalam harga konstan. Hal itu juga menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut juga oleh seberapa besar terjadi transfer payment yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah atau mendapat aliran dana dari luar wilayah (Richardson, 1991).

Menurut Sirojuzilam (2008), perbedaan pokok antara analisis pertumbuhan perekonomian nasional dan analisis pertumbuhan daerah adalah bahwa yang dititikberatkan dalam analisis tersebut belakangan adalah perpindahan faktor (factors movement). Kemungkinan masuk dan keluarnya arus perpindahan tenaga kerja dan modal menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi regional. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah akan lebih cepat apabila memiliki keuntungan absolute kaya akan sumber daya alam dan memiliki keuntungan komparatif apabila daerah tersebut lebih efisien dari daerah lain dalam melakukan kegiatan produksi dan perdagangan.

Teori pertumbuhan ekonomi wilayah menganalisis suatu wilayah sebagai suatu sistem ekonomi terbuka yang berhubungan dengan wilayahwilayah lain melalui arus perpindahan faktor-faktor produksi dan pertukaran komoditas. Pembangunan dalam suatu wilayah akan mempengaruhi pertumbuhan wilayah lain dalam bentuk permintaan sektor untuk wilayah lain yang akan mendorong pembangunan wilayah tersebut atau suatu pembangunan ekonomi dari wilayah lain akan mengurangi tingkat kegiatan ekonomi di suatu wilayah serta interrelasi.

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah peningkatan volume variabel ekonomi dari suatu sub sistem spasial suatu bangsa atau negara dan juga dapat diartikan sebagai peningkatan kemakmuran suatu wilayah. Pertumbuhan yang terjadi dapat ditinjau dari peningkatan produksi sejumlah komoditas yang diperoleh suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah penambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi di wilayah tersebut.

2.2. Kesenjangan Wilayah

Menurut Syafrizal (2008), ketimpangan yang terjadi antar wilayah disebabkan oleh perbedaan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah, sehingga tiap daerah mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam proses pembangunan. Perbedaan wilayah ini yang menimbulkan adanya wilayah maju dan wilayah terbelakang. Menurut hipotesa Neo-Klasik, dalam proses pembangunan awalnya ketimpangan akan meningkat, proses ini akan terjadi hingga ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah mencapai titik puncak dan proses pembangunan masih terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan tersebut akan menurun (Syafrizal, 2008).

Ketimpangan antar wilayah dalam kenyataannya tidak dapat dihilangkan dalam proses pembangunan suatu daerah. Dengan adanya ketimpangan, maka akan mendorong daerah yang terbelakang untuk dapat berusaha meningkatkan kualitas pembangunannya agar tidak tertinggal dengan daerah yang sudah maju. Selain dampak positif dari adanya ketimpangan dalam pembangunan, adapun dampak negatif yang ditimbulkan yaitu dengan semakin tingginya ketimpangan antar wilayah maka akan semakin terjadi inefisiensi ekonomi, sehingga melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dianggap tidaklah adil (Todaro, 2004).

Tingkat ketimpangan antar wilayah dapat diketahui dengan menggunakan indeks ketimpangan regional (*regional inequality*) yang dinamakan indeks ketimpangan Williamson. Dimana:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y}$$

Y_i = PDRB per kapita daerah i

Y = PDRB per kapita rata-rata seluruh daerah

F_i = Jumlah penduduk daerah i

N = Jumlah penduduk seluruh daerah

Indeks Williamson mempunyai nilai antara 0-1, dimana semakin mendekati nol artinya maka menunjukkan wilayah tersebut semakin tidak timpang, dan apabila mendekati satu maka wilayah tersebut semakin timpang.

2.2.1. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan

indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

1. Pendekatan Produksi

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi dalam penyajian ini dikelompokkan dalam 17 lapangan usaha, yaitu: (1) pertanian, kehutanan dan perikanan, (2) pertambangan dan penggalan, (3) industri pengolahan, (4) pengadaan listrik, (5) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, (6) konstruksi, (7) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil & sepeda motor, (8) transportasi dan pergudangan, (9) penyediaan akomodasi dan makan minum, (10) informasi dan komunikasi, (11) jasa keuangan dan asuransi, (12) real estate, (13) jasa perusahaan, (14) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, (15) jasa pendidikan, (16) jasa kesehatan dan kegiatan lainnya dan (17) jasa lainnya.

2. Pendekatan Pengeluaran

Produk Domestik Regional Bruto adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (a) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, (b) konsumsi pemerintah, (c) pembentukan modal tetap domestik bruto, (d) perubahan inventori dan (e) ekspor netto (merupakan ekspor dikurangi impor).

3. Pendekatan Pendapatan

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

PDRB perkapita sebagai proxy dari pendapatan perkapita merupakan gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat dan adanya aktivitas produksi. Sedangkan PDRN perkapita merupakan gambaran pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk sebagai keikut sertaannya dalam proses produksi. Kedua indikator tersebut biasanya digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah. Apabila data tersebut disajikan secara berkala akan menunjukkan adanya perubahan kemakmuran

2.2.2. Konsumsi Rumah Tangga

Dilihat dari arti ekonomi, konsumsi merupakan tindakan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna ekonomi suatu benda. Sedangkan menurut Drahman Bannoch dalam bukunya *Microeconomics* memberikan pengertian tentang konsumsi yaitu merupakan pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu (dalam satu tahun) pengeluaran. Pembelanjaan masyarakat atas makanan, pakaian, dan barang-barang kebutuhan mereka yang lain digolongkan pembelanjaan atau konsumsi.

Barang-barang yang diproduksi untuk digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dinamakan barang konsumsi.

Pengeluaran konsumsi masyarakat adalah salah satu variabel makro ekonomi yang dilambangkan "C". Konsep konsumsi yang merupakan konsep yang di Indonesiakan dalam bahasa Inggris "*Consumption*", merupakan pembelanjaan yang dilakukan oleh rumahtangga ke atas barang-barang akhir dan jasa-jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari orang-orang yang melakukan pembelanjaan tersebut atau juga pendapatan yang dibelanjakan. Sedangkan pengeluaran rata-rata per kapita sebulan adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan rumahtangga sebulan untuk konsumsi semua anggota rumahtangga dibagi dengan banyaknya anggota rumahtangga.

Pengeluaran atau konsumsi rumahtangga dibedakan menjadi dua yaitu konsumsi makanan dan bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumahtangga saja, tidak termasuk konsumsi pengeluaran untuk keperluan usaha rumahtangga atau yang diberikan kepada pihak lain. Pengeluaran untuk konsumsi makanan ditanyakan selama seminggu yang lalu, sedangkan pengeluaran untuk bukan makanan setahun yang lalu. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan kedalam pengeluaran rata-rata sebulan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi rumah tangga ialah:

A. Faktor Ekonomi

Empat faktor yang menentukan tingkat konsumsi, yaitu:

1. Pendapatan Rumah Tangga (*Household Income*)

Pendapatan rumah tangga amat besar pengaruhnya terhadap tingkat konsumsi. Biasanya makin baik tingkat pendapatan, tingkat konsumsi makin tinggi. Karena ketika tingkat pendapatan meningkat, kemampuan rumah

tangga untuk membeli aneka kebutuhan konsumsi menjadi semakin besar atau mungkin juga pola hidup menjadi semakin konsumtif, setidaknya semakin menuntut kualitas yang baik.

2. Kekayaan Rumah Tangga (*Household Wealth*)

Tercakup dalam pengertian kekayaan rumah tangga adalah kekayaan riil (rumah, tanah, dan mobil) dan financial (deposito berjangka, saham, dan surat-surat berharga). Kekayaan tersebut dapat meningkatkan konsumsi, karena menambah pendapatan disposable.

3. Tingkat Bunga (*Interest Rate*)

Tingkat bunga yang tinggi dapat mengurangi keinginan konsumsi. Dengan tingkat bunga yang tinggi, maka biaya ekonomi (*opportunity cost*) dari kegiatan konsumsi akan semakin mahal. Bagi mereka yang ingin mengonsumsi dengan berutang dahulu, misalnya dengan meminjam dari bank atau menggunakan kartu kredit, biaya bunga semakin mahal, sehingga lebih baik menunda/mengurangi konsumsi.

4. Perkiraan Tentang Masa Depan (*Household Expectation About The Future*)

Faktor-faktor internal yang dipergunakan untuk memperkirakan prospek masa depan rumah tangga antara lain pekerjaan, karier dan gaji yang menjanjikan, banyak anggota keluarga yang telah bekerja. Sedangkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi antara lain kondisi perekonomian domestic dan internasional, jenis-jenis dan arah kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah.

B. Faktor Demografi

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk yang banyak akan memperbesar pengeluaran konsumsi secara menyeluruh, walaupun pengeluaran rata-rata per orang atau per keluarga relative rendah. Pengeluaran konsumsi suatu negara akan sangat besar, bila jumlah penduduk sangat banyak dan pendapatan per kapita sangat tinggi.

2. Komposisi Penduduk

Pengaruh komposisi penduduk terhadap tingkat konsumsi, antara lain:

- a. Makin banyak penduduk yang berusia kerja atau produktif (15-64 tahun), makin besar tingkat konsumsi. Sebab makin banyak penduduk yang bekerja, penghasilan juga makin besar.
- b. Makin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, tingkat konsumsinya juga makin tinggi, sebab pada saat seseorang atau suatu keluarga makin berpendidikan tinggi maka kebutuhan hidupnya makin banyak.
- c. Makin banyak penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan (urban), pengeluaran konsumsi juga semakin tinggi. Sebab umumnya pola hidup masyarakat perkotaan lebih konsumtif dibanding masyarakat pedesaan.

C. Faktor-faktor Non Ekonomi

Faktor-faktor non-ekonomi yang paling berpengaruh terhadap besarnya konsumsi adalah faktor social budaya masyarakat. Misalnya saja, berubahnya pola kebiasaan makan, perubahan etika dan tata nilai karena ingin meniru kelompok masyarakat lain yang dianggap lebih hebat/ideal.

2.2.3. Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan adalah konsep yang lebih luas dibandingkan kemiskinan karena cakupannya tidak hanya menganalisa populasi yang berada dibawah garis kemiskinan. Kebanyakan dari ukuran dan indikator yang mengukur tingkat distribusi pendapatan tidak tergantung pada rata-rata distribusi, dan karenanya membuat ukuran distribusi pendapatan dipertimbangkan lemah dalam menggambarkan tingkat kesejahteraan. Masalah utama dalam distribusi pendapatan sebuah daerah adalah ketidakmerataan pendapatan antar kelompok masyarakat dalam daerah tersebut, oleh karenanya sering juga disebut tingkat ketidakmerataan atau kesenjangan (*inequality*).

Cara distribusi pendapatan nasional akan menentukan bagaimana pendapatan nasional yang tinggi mampu menciptakan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan dalam masyarakat, seperti mengurangi kemiskinan, pengangguran dan kesulitan-kesulitan lain dalam masyarakat. Distribusi pendapatan nasional yang tidak merata, tidak akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat secara umum. Sistem distribusi yang tidak merata hanya akan menciptakan kemakmuran bagi golongan tertentu saja. Perbedaan pendapatan timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi. Pihak yang memiliki faktor produksi yang lebih banyak akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak juga.

2.3. Kesenjangan Pembangunan Regional

Pembahasan mengenai kesenjangan tidak dapat terlepas dari Hipotesis Williamson. Berdasarkan kerangka tersebut, hubungan antara kesenjangan antarwilayah dan pembangunan berbentuk kurva U-terbalik. Pada periode awal pembangunan, ekonomi akan terkonsentrasi pada satu atau beberapa wilayah.

Pertumbuhan ekonomi selanjutnya menyebar ke wilayah-wilayah lainnya seiring dengan meningkatnya ukuran pasar (Tirado, Díez-Minguella, & Martinez-Galarraga, 2016).

Pemahaman mengenai kesenjangan antarwilayah kemudian diperluas oleh Myrdal dengan memperkenalkan konsep spread effect dan backwash effect (Amalia, Santoso, & Sasongko, 2018). Spread effect mengacu pada efek penyebaran hasil-hasil pembangunan di pusat pertumbuhan ke wilayah-wilayah sekitarnya, sedangkan backwash effect mengacu pada efek penyerapan faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal dari wilayah pinggiran ke pusat pertumbuhan. Kesenjangan antarwilayah semakin melebar apabila backwash effect lebih kuat pengaruhnya daripada spread effect. Dengan kata lain, kesenjangan antarwilayah disebabkan adanya kebijakan penguatamaan pusat pertumbuhan (*growth pole policies*) dan strategi pertumbuhan tidak seimbang (*unbalanced growth strategy*).

Pembahasan mengenai kesenjangan antarwilayah juga dibahas di dalam literatur teori pertumbuhan neoklasik, dimana kesenjangan antarwilayah bersifat sementara. Pada prinsipnya, kondisi awal suatu wilayah dengan wilayah lainnya berbeda sehingga kondisi steady state yang didapati berbeda pula. Namun demikian, teori pertumbuhan neoklasik meyakini akan terjadi konvergensi, dimana daerah miskin akan mampu menyusul daerah kaya. Meminjam istilah Barro dan Sala-i-Martin (2004), terdapat dua konvergensi akan terjadi pada pembangunan ekonomi antarwilayah: (i) konvergensi absolut yaitu: konvergensi yang terjadi karena daerah miskin dengan pendapatan per kapita yang rendah mampu tumbuh lebih cepat daripada daerah kaya; dan (ii) konvergensi bersyarat yaitu: konvergensi terjadi karena daerah miskin mampu tumbuh lebih cepat

dengan memanfaatkan karakteristik struktural yang dimilikinya (infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya).

Adapun teori yang dikembangkan *New Economic Geography* (NEG) menolak asumsi pertumbuhan neoklasik yang menganggap bahwa mobilitas faktor produksi dianggap sempurna. Mendasarkan pemikiran pada argumen Myrdal (Lovely, Liang, & Zhang, 2019), NEG menekankan bahwa arus modal cenderung memusat pada wilayah yang memiliki return yang lebih tinggi. Krugman (1998) mengungkapkan bahwa proses ini semakin kuat dikarenakan adanya keterkaitan ke depan dan ke belakang pada sektor industri. Pada ujungnya, keterkaitan yang kuat menghasilkan pembentukan hubungan antara wilayah inti (identik dengan sektor industri) dan wilayah pinggiran (identik dengan sektor pertanian). Struktur wilayah inti-pinggiran ini persisten selama manfaat yang diperoleh industri dalam mengonsentrasikan aktivitas ekonominya di wilayah inti cukup besar. Struktur wilayah inti-pinggiran ini menguat pada negara-negara yang sedang bertransisi seperti Rusia (Bradshaw & Vartapetov, 2013) dan Tiongkok (Wei & Ye, 2009) yang identik dengan peningkatan kesenjangan antar-wilayah.

Sejumlah fakta cenderung mendukung kemungkinan terbentuknya kurva evolusi ketidaksetaraan regional. Berdasarkan Kuznets (1955) dan Williamson (1965), memberikan analisis yang luas tentang topik tersebut dengan mempertimbangkan secara rinci mekanisme *spillover* yang mendorong terjadinya ketidaksetaraan regional sesuai dengan tahapan perkembangan suatu negara selama industrialisasi.

Menurut Williamson (1965), *spillover* dapat terjadi melalui sejumlah saluran seperti migrasi, aliran modal, kebijakan pemerintah dan perdagangan antar daerah. Berdasarkan bukti statistik untuk sejumlah negara antara akhir

abad XIX dan Perang Dunia II, Williamson menemukan beberapa hal yang mendukung terbentuknya hubungan non-linear antara ketidaksetaraan regional dan pembangunan nasional. Berdasarkan hasil temuan tersebut, dapat disimpulkan dua fakta empiris utama: **pertama**, kesenjangan regional lebih besar di negara-negara kurang berkembang dan lebih kecil di negara-negara yang lebih maju; serta **kedua**, seiring waktu, kesenjangan regional meningkat di negara-negara yang kurang berkembang dan semakin menurun di negara yang lebih maju. Dengan demikian, ketidaksetaraan pendapatan daerah dapat dianggap sebagai hasil sampingan dari proses pembangunan dan industrialisasi.

Kim dan Margo (2003) juga menunjukkan bahwa di beberapa negara, kebangkitan industrialisasi selama paruh kedua abad ke-19 telah meningkatkan kesenjangan pendapatan regional, di mana industri manufaktur terkonsentrasi di salah satu bagian negara dan spesialisasi dalam kegiatan pertanian terjadi di bagian yang lain. Namun, pada paruh kedua abad ke-20, struktur industri regional bersatu melalui penyebaran pertanian dan meningkatnya kegiatan jasa di seluruh bagian dari negara tersebut.

2.4. Peran Spasial Dalam Pembangunan Ekonomi

Ketergantungan spasial merupakan hukum dasar geografi yang dicetuskan oleh Tobler. Dalam karyanya, Tobler menyatakan bahwa suatu wilayah memiliki keterkaitan dengan wilayah yang lain, namun kedua wilayah yang saling berdekatan akan lebih terhubung daripada kedua wilayah yang berjauhan (Miller, 2004). Hal ini menunjukkan bahwa jarak antar satu wilayah dan wilayah lainnya lebih dekat akan memberikan dampak yang signifikan. Hukum geografi Tobler tersebut menjadi landasan bagi analisis statistik spasial autokorelasi untuk menganalisis hubungan antara jarak atau konektivitas. Dalam

analisis spasial, terdapat sebuah fakta bahwa masing-masing wilayah memiliki derajat keunikan dan pola tersendiri (Miller, 2004)

Dalam konteks ekonomi, pola spasial merupakan salah satu upaya yang secara kolektif dikenal dengan “*New Economic Geography*” yang mengembangkan pemikiran tentang dampak lokasi seperti aglomerasi, dimana perusahaan cenderung berkumpul membentuk wilayah industri (Krugman, 1995; Baldwin, 1999). Krugman menyatakan bahwa model geografi ekonomi secara eksplisit membahas kemungkinan dampak integrasi ekonomi terhadap distribusi geografis industri, menekan *trade-off* antara biaya tetap, skala ekonomi dan biaya transportasi. Tabuchi (2012) menyatakan bahwa model *new economic geography* membahas kecenderungan distribusi spasial dalam barang setengah jadi, biaya perjalanan, tanah untuk perumahan, biaya transportasi, heterogenitas perusahaan, dan pertumbuhan ekonomi. Model *new economic geography* dikembangkan untuk menjelaskan jarak antara cluster individu terhadap industri tertentu.

Penelitian Tabuchi mengungkapkan bahwa model *new economic geography* yang menggambarkan distribusi spasial kegiatan ekonomi dua wilayah terlalu sederhana. Banyak daerah berinteraksi baik dalam perdagangan maupun dalam migrasi dimana lokasi geografis daerah tidak simetris menunjukkan bahwa biaya transportasi wilayah masing-masing berbeda. Sehingga memungkinkan distribusi spasial kegiatan ekonomi menjadi beragam.

Teori geografi ekonomi baru berupaya untuk menurunkan efek-efek aglomerasi dari interaksi antara besarnya pasar, biaya transportasi dan *increasing return* dari perusahaan. Dalam hal ini ekonomi aglomerasi tidak diasumsikan tetapi diturunkan dari interaksi ekonomi skala pada tingkat perusahaan, biaya transportasi dan mobilitas faktor produksi. Teori ekonomi

geografi baru menekankan pada adanya mekanisme kausalitas sirkular untuk menjelaskan konsentrasi spasial dari kegiatan ekonomi (Krugman, 1998). Dalam model tersebut kekuatan sentripetal berasal dari adanya variasi konsumsi atau beragamnya intermediate goods pada sisi produksi. Kekuatan sentrifugal berasal dari tekanan yang dimiliki oleh konsentrasi geografis dari pasar input lokal yang menawarkan harga lebih tinggi dan menyebarnya permintaan. Jika biaya transportasi cukup rendah maka akan terjadi aglomerasi.

Analisis spasial tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi semata, namun juga berkaitan dengan aspek fundamental lainnya, yaitu kesehatan dan lingkungan. Keterkaitan antara analisis spasial dengan sektor kesehatan menjadi tren penelitian yang semakin berkembang dari waktu ke waktu (Santana, et.al 2015). Disparitas kesehatan yang terjadi di seluruh dunia tidak hanya berkaitan dengan faktor individu semata, namun juga dengan aspek social, ekonomi dan spasial (Wilkinson & Marmot, 2003). Meskipun pemahaman yang komprehensif tentang kesehatan merupakan faktor fundamental yang harus diperhatikan untuk mengatasi terjadinya disparitas kesehatan, namun akses untuk mendapatkan fasilitas medis merupakan komponen penting bagi masyarakat untuk mendapatkan penanganan kesehatan yang cukup dan tepat (Wilkinson & Marmot, 2003). Joseph dan Phillips (1984) menjelaskan bahwa perbedaan pola spasial dapat berpengaruh terhadap akses kesehatan ke setiap wilayah di suatu negara, sehingga hal tersebut menimbulkan disparitas kesehatan dan kesejahteraan. Perencanaan spasial perlu dikaitkan dengan aspek kesehatan dan aspek fundamental lainnya seperti lingkungan, perumahan, transportasi, pendidikan dan budaya (Satinha, 2015). Integrasi model spasial dengan aspek fundamental tersebut akan menciptakan peluang keuntungan bagi aglomerasi

ekonomi dan juga dapat mereduksi biaya transportasi (Henderson, Kelly, & Taylor, 2000).

Selain berkaitan dengan kesehatan, analisis spasial juga berkaitan erat dengan lingkungan. Dalam kaitannya dengan lingkungan, perencanaan spasial berperan besar untuk membantu implementasi pembangunan berkelanjutan (Eggenberger & Partidario, 2000). Hubungan antara analisis spasial dengan aspek lingkungan tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan fisik lingkungan dari segala macam bentuk polusi, penyakit bahkan kematian (Sexton, Zhang, & Chalfant, 2003). Dalam kaitannya dengan kesehatan fisik lingkungan, analisis spasial digunakan untuk mengamati sejauh mana kondisi kerusakan lingkungan dan kemudian menjadi alat bantu bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan terkait reduksi kerusakan lingkungan agar tidak mengakibatkan dampak negative.

Pertama kali analisis spasial digunakan dalam pembangunan ekonomi adalah teori lokasi. Dimana teori ini memberikan kerangka analisa yang baik dan sistematis mengenai pemilihan lokasi kegiatan ekonomi dan sosial, serta analisa interaksi antar wilayah. Teori Lokasi menjadi penting dalam analisa ekonomi karena pemilihan lokasi yang baik akan dapat memberikan penghematan yang sangat besar untuk biaya angkut sehingga mendorong terjadinya efisiensi baik dalam bidang produksi maupun pemasaran. Sedangkan interaksi antar wilayah akan dapat pula mempengaruhi perkembangan bisnis yang pada gilirannya akan dapat pula mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah (Sjafrizal, 2008).

Untuk menganalisis pembangunan wilayah, harus sepenuhnya memahami kekuatan-kekuatan aglomerasi dan deaglomerasi. Kekuatan-kekuatan tersebut dapat menjelaskan terjadinya konsentrasi dan dekonsentrasi atau dispersi

kegiatan industri dan kegiatan-kegiatan lainnya. Manfaat-manfaat yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan di atas dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, antara lain yaitu: penghematan secara skala (*scale economies*), penghematan lokasi (*localization economies*), serta penghematan urbanisasi (*urbanization economies*). Ketiga kategori tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penghematan skala (*scale economies*). Terdapat penghematan dalam produksi secara internal bila skala produksinya ditingkatkan. Biaya tetap yang besar sebagai akibat investasi dalam bentuk pabrik dan peralatan, yang memungkinkan dilaksanakan pemanfaatan pabrik dan peralatan tersebut dalam skala besar dapat membagi-bagi beban biaya-biaya tetap pada berbagai unit terdapat dalam system produksi. Sebagai konsekuensinya, unit biaya produksi menjadi lebih rendah sehingga dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Produksi pada skala besar dimaksudkan untuk menghindari unit biaya operasi yang eksekutif. Hal ini dapat dipertanggungjawabkan hanya pada lokasi-lokasi yang melayani penduduk dalam jumlah besar, atau dengan perkataan lain mempunyai suatu pasar yang luas. Jadi dapat disimpulkan bahwa terjadinya penghematan skala internal memberikan manfaat pada konsentrasi penduduk dalam jumlah besar daripada jumlah penduduk yang sedikit, industri dan kegiatan-kegiatan lainnya.
2. Penghematan lokalisasi (*localization economies*). Jenis kedua, kekuatan yang terpenting konsentrasi industri diasosiasikan dengan penghematan yang dinikmati oleh semua perusahaan dalam suatu industri yang sejenis pada suatu lokasi tertentu. Hal ini disebabkan karena bertambahnya jumlah keluaran (total output) industri tersebut. Sebagai ilustrasi dapat

dikemukakan mengenai pabrik tekstil. Kasus disuatu wilayah yang belum berkembang, dimana terdapat kelayakan untuk mendirikan pabrik-pabrik modern ukuran kecil yang tidak membutuhkan investasi modal yang eksesif dan dapat beroperasi tanpa dilayani oleh tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang tinggi dan spesialis. Berkelompok dan terkonsentrasinya pabrik-pabrik sejenis pada suatu daerah geografis tertentu, misalnya di daerah-daerah perkotaan, akan menciptakan penghematan lokalisasi dan akan meningkatkan pertumbuhan kota-kota tersebut.

3. Penghematan urbanisasi (*urbanization economies*). Penghematan urbanisasi diasosiasikan dengan pertambahan jumlah total (penduduk, hasil industri, pendapatan, dan kemakmuran) di suatu lokasi untuk semua kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Penghematan ini terkait pada kegiatan-kegiatan industri-industri dan sektor-sektor secara agregatif.

Keuntungan aglomerasi baru dapat muncul bilamana terdapat keterkaitan yang erat antara kegiatan ekonomi yang ada pada konsentrasi tersebut baik dalam bentuk keterkaitan dengan input (*Backward Linkages*) atau keterkaitan output (*Forward Linkages*). Dengan adanya keterkaitan ini akan menimbulkan berbagai bentuk keuntungan eksternal bagi para pengusaha, baik dalam bentuk penghematan biaya produksi, biaya angkut bahan baku, dan hasil produksi serta penghematan biaya penggunaan fasilitas karena beban dapat ditanggung bersama. Penghematan tersebut selanjutnya akan dapat menurunkan biaya yang harus dikeluarkan oleh para pengusaha sehingga daya saingnya menjadi semakin meningkat. Penurunan biaya inilah yang selanjutnya mendorong terjadinya peningkatan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi yang berada dalam kawasan pusat pertumbuhan tersebut.

Perkembangan teori lokasi adalah munculnya teori tempat Sentral (*Central Place Theory*). Dimana teori ini menjelaskan pola geografis dan struktur hierarkis pusat-pusat kota atau wilayah-wilayah nodal, tetapi tidak menjelaskan bagaimana pola geografis tersebut terjadi secara gradual dan bagaimana pola tersebut mengalami perubahan-perubahan pada masa depan, atau dapat dikatakan tidak menjelaskan gejala-gejala (fenomena) pembangunan. Dengan demikian teori tersebut dapat dikatakan bersifat statis. Agar teori tempat sentral mampu menjelaskan gejala-gejala dinamis, maka perlu ditunjang oleh teori-teori pertumbuhan wilayah. Salah satu diantaranya adalah teori Perroux (kutub pertumbuhan) yang membahas perubahan-perubahan struktural pada tata ruang geografis. Atau dapat dikatakan teori tempat sentral merupakan dasar dari teori kutub pertumbuhan.

Pengembangan teori *central place* dalam pembangunan menjadi teori kutub pertumbuhan (*Growth Pole Theory*), dimana ketika ada kenyataan bahwa potensi dan kemampuan masing-masing wilayah berbeda-beda satu sama lainnya. Sehingga usaha-usaha pembangunan sektoral yang akan dilaksanakan harus disinkronisasikan dengan usaha-usaha pembangunan regional. Hirschman mengatakan bahwa untuk mencapai tingkat pendapatan yang lebih tinggi, terdapat keharusan untuk membangun sebuah atau beberapa buah pusat kekuatan ekonomi dalam wilayah suatu negara, atau yang disebut sebagai pusat-pusat pertumbuhan (*growth point* atau *growth pole*). Terdapat elemen yang sangat menentukan dalam konsep kutub pertumbuhan, yaitu pengaruh yang tidak dapat dielakkan dari suatu unit ekonomi terhadap unit-unit ekonomi lainnya. Pengaruh tersebut semata adalah dominasi ekonomi yang terlepas dari pengaruh tata ruang geografis dan dimensi ekonomi yang terlepas dari pengaruh tata ruang geografis dan dimensi tata ruang (*geographic space and space*

dimension). Proses pertumbuhan adalah konsisten dengan teori tata ruang ekonomi (*economic space theory*), dimana industri pendorong (*propulsive industries* atau *industries motrice*) dianggap sebagai titik awal dan merupakan elemen esensial untuk percepatan pertumbuhan daerah.

Selanjutnya, teori *central place* yang telah mengalami perbaikan ini disintesakan dengan teori pertumbuhan neo-klasik yang menyakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu secara alamiah (tanpa perlu intervensi pemerintah) justru akan memperbaiki kesenjangan. Teori ini terkenal dengan teori pertumbuhan konvergen (*Convergence Theory*). Kondisi pertumbuhan ekonomi yang konvergen terjadi karena adanya *spillover*, yaitu proses melubernya aktivitas ekonomi pada satu daerah ke daerah lainnya. Teori Konvergen dapat terjadi jika wilayah yang bersangkutan telah maju, maka kesenjangan pembangunan regional akan berkurang (*Convergence*). Berdasarkan pandangan neo-klasik, intervensi pasar justru memperburuk kesenjangan wilayah, karena intervensi pasar biasanya justru bersifat memperlambat proses penyesuaian pembangunan menuju pada keseimbangan.

2.4.1. Teori Tempat Sentral (*Central Place Theory*)

Teori tempat sentral menjelaskan pola geografis dan struktur hierarkis pusat-pusat kota atau wilayah-wilayah nodal, tetapi tidak menjelaskan bagaimana pola geografis tersebut terjadi secara gradual dan bagaimana pola tersebut mengalami perubahan-perubahan pada masa depan, atau dapat dikatakan tidak menjelaskan gejala-gejala (fenomena) pembangunan. Dengan demikian teori tersebut dapat dikatakan bersifat statis. Agar teori tempat sentral mampu menjelaskan gejala-gejala dinamis, maka perlu ditunjang oleh teori-teori pertumbuhan wilayah. Salah satu diantaranya adalah teori Perroux (kutub

pertumbuhan) yang membahas perubahan-perubahan struktural pada tata ruang geografis. Atau dapat dikatakan teori tempat sentral merupakan dasar dari teori kutub pertumbuhan.

Teori tempat sentral sebagian bersifat positif karena berusaha menjelaskan pola aktual arus pelayanan jasa, dan sebagian lagi bersifat normatif karena berusaha menentukan pola optimal distribusi tempat-tempat sentral. Teori tempat sentral mempunyai kontribusi pada pemahaman interrelasi spasial dan kota-kota sebagai sistem di dalam sistem perkotaan.

Teori tempat sentral tidak memberikan penjelasan secara lengkap mengenai pertumbuhan kota karena teori tersebut diformulasikan berdasarkan pembangunan daerah pertanian yang tersusun secara hierarkis dan berpenduduk merata. Dengan tumbuhnya kota-kota maka muncullah jasa-jasa yang tidak berkorelasi dengan pasar wilayah belakang. Sebagai contoh kehidupan kota metropolitan dapat menciptakan kebutuhan-kebutuhan sendiri (internal), misalnya peningkatan penyediaan fasilitas penyediaan air minum, listrik, angkutan umum, demikian pula kebutuhan fasilitas parkir. Persoalan-persoalan yang dihadapi dalam pertumbuhan kota ternyata tidak sesederhana seperti persoalan pemasaran barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh tempat sentral. Analisis tempat sentral menekankan pada peranan sektor perdagangan dan kegiatan-kegiatan jasa daripada kegiatan-kegiatan manufaktur.

Kegiatan manufaktur dianggap sebagai kegiatan produktif non tempat sentral. Hal ini tidak sesuai dengan kenyataan. Banyak kota-kota besar dan kota-kota lainnya sering kali mengalami perluasan dalam hal lokasi manufaktur karena kota-kota yang bersangkutan merupakan pasar tenaga kerja yang luas dan pada umumnya memberikan keuntungan-keuntungan aglomerasi, dimana

perusahaan-perusahaan manufaktur lebih banyak melayani pasar nasional daripada pasar-pasar regional.

Model tempat sentral ternyata tidak berhasil menjelaskan timbulnya kecendrungan yang kuat dalam masyarakat mengenai pengelompokan perusahaan-perusahaan karena pertimbangan keuntungan-keuntungan aglomerasi dan ketergantungan.

2.4.2. Teori Kutub Pertumbuhan (*Growth Pole Theory*)

Sebagaimana diketahui bahwa potensi dan kemampuan masing-masing wilayah berbeda-beda satu sama lainnya, demikian pula masalah pokok yang dihadapinya tidak sama. Sehingga usaha-usaha pembangunan sektoral yang akan dilaksanakan harus disinkronisasikan dengan usaha-usaha pembangunan regional. Hirschman mengatakan bahwa untuk mencapai tingkat pendapatan yang lebih tinggi, terdapat keharusan untuk membangun sebuah atau beberapa buah pusat kekuatan ekonomi dalam wilayah suatu negara, atau yang disebut sebagai pusat-pusat pertumbuhan (*growth point* atau *growth pole*). Terdapat elemen yang sangat menentukan dalam konsep kutub pertumbuhan, yaitu pengaruh yang tidak dapat dielakkan dari suatu unit ekonomi terhadap unit-unit ekonomi lainnya. Pengaruh tersebut semata adalah dominasi ekonomi yang terlepas dari pengaruh tata ruang geografis dan dimensi ekonomi yang terlepas dari pengaruh tata ruang geografis dan dimensi tata ruang (*geographic space and space dimension*). Proses pertumbuhan adalah konsisten dengan teori tata ruang ekonomi (*economic space theory*), dimana industri pendorong (*propulsive industries* atau *industries motrice*) dianggap sebagai titik awal dan merupakan elemen esensial untuk pembangunan selanjutnya.

Nampaknya Perroux lebih menekankan pada aspek pemusatan pertumbuhan (Adisasmita, 2005). Hirschman berdalil bahwa pertumbuhan awalnya terbatas pada wilayah-wilayah yang disukai, meskipun kesenjangan menyebar berdasarkan letak geografis, meliputi terpencil dan pertumbuhan ini terjadi melalui dampak hubungan dengan kutub-kutub pertumbuhan. Teori kutub pertumbuhan menyajikan dua fungsi baik fungsi idiologi maupun fungsi politik. Di dalam suatu arti idiologis dan pada suatu tingkat teoritis yang tidak dapat diambil melalui pertanyaan-pertanyaan sosial yang lebih mendalam. Teori kutub pertumbuhan bersandar terhadap mekanisme harga sebagai faktor penengah dan retribusi sumberdaya. Perroux menetapkan bahwa sektor-sektor pertumbuhan didefinisikan dengan hubungan-hubungan ekonomi dengan unit-unit lain di dalam ekonomi. Asumsi Perroux adalah tujuan sosial dari perkembangan wilayah yang dimanfaatkan oleh agen-agen yang ingin memperoleh keuntungan pribadi. Mengikuti pendapat Perroux, Boudeville mendefinisikan kutub pertumbuhan wilayah sebagai seperangkat industri sedang berkembang yang berlokasi di suatu daerah perkotaan dan mendorong lebih lanjut perkembangan ekonomi melalui wilayah pengaruhnya (*localized development pole*). Teori Boudeville dapat dianggap sebagai pelengkap terhadap teori tempat sentral yang diformulasikan oleh Christaller dan kemudian diperluas oleh Losch. Boudeville mengemukakan aspek “kutub fungsional” dan memberikan pula perhatian pada aspek geografis (Piche, 1982).

2.4.3. Teori Konvergen (*Convergence Theory*)

Bila proses pembangunan terus berlanjut, dengan semakin baiknya prasarana dan fasilitas komunikasi, maka mobilitas modal dan tenaga kerja tersebut akan semakin lancar. Teori Konvergen dapat terjadi jika negara yang bersangkutan telah maju, maka kesenjangan pembangunan regional akan

berkurang (*convergence*). Dari pandangan neo-klasik, kesenjangan wilayah dapat dihubungkan dengan faktor ketidaksempurnaan pasar dan sifat kelambanan proses pembangunan. Menyamaratakan faktor harga antara wilayah dalam suatu wilayah melalui integrasi akan meningkatkan faktor mobilitas sehingga dengan demikian akan ada pencapaian keseimbangan atau pola pertumbuhan wilayah konvergen. Hal tersebut juga ditanggapi rendahnya pendapatan wilayah akan meningkatkan para pekerja melalui migrasi, sehingga menarik investor dengan biaya pekerja yang rendah. Teori konvergen akan terus berlanjut sampai para pekerja dan penghasilan seimbang. Karena wilayah yang produktivitas dan tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi kedepannya akan lebih sulit menghitung hasil pengurangannya. Akibatnya, untuk dapat menyeimbangkan perekonomian dapat dilakukan jika perekonomian berada pada posisi yang lemah. Teori harga Factor Price Equalization (FPE) sudah menjadi dasar pemikiran yang kuat dalam perdagangan bebas internasional sejak Heckscher berpendapat bahwa pada kondisi tertentu membuka perdagangan yang akan menyamakan hasil- terhadap kesamaan faktor-faktor pada negara-negara lain, dan Ohlin pada awal abad ini, dan disempurnakan oleh Paul Samuelson menyempurnakan secara matematis. Dalam analisa integrasi perekonomian dunia, beberapa ahli seperti Porter dan Krugman mulai melihat pentingnya jarak geografis. Bertil Ohlin membuat asumsi bahwa dua faktor produksi merupakan hal yang penting di setiap negara, yang sebahagian faktor tersebut merupakan hal yang tidak penting pada beberapa negara.

Komoditas bergerak dengan baik di perdagangan internasional, tanpa didukung pajak atau biaya transportasi. Dari pandangannya, perdagangan bebas telah cukup mampu menggantikan mobilitas internasional sehingga pergerakan terhadap perdagangan bebas akan menyebabkan harga pada negara–negara

menjadi sama. Dan jika kedua negara melanjutkan untuk menghasilkan barang-barang pada perdagangan bebas, faktor harganya sebenarnya akan menjadi sama tanpa pergerakan. Kesamaan faktor harga ini (FPE) dibuktikan secara matematis oleh Samuelson. Teori konvergen masih digunakan sebagai model dalam literatur teori pertumbuhan, yang menyatakan bahwa liberalisasi dalam asas dasar dapat meningkatkan proses konvergen melalui wilayah (Hwang, 1996).

2.4.4. Teori Divergen (*Divergence Theory*)

Divergence terjadi pada saat modal dan tenaga kerja ahli cenderung terkonsentrasi di daerah yang lebih maju sehingga kesenjangan pembangunan regional cenderung melebar. Kesenjangan wilayah yang tinggi menyebabkan pengangguran atau tingkat pendapatan yang cenderung menurun pada sebahagian masyarakat. Untuk mengatasi ini diperlukan campur tangan pemerintah untuk membuat kebijakan yang akan mengurangi kesenjangan wilayah (Jeong, 1995). Bila wilayah miskin mampu untuk menaikkan pendapatan per kapita masyarakat secara terus menerus, maka kesenjangan wilayah dapat dipersempit secara perlahan (Dapeng, 1998).

Ada tiga strategi dasar dimana para pembuat kebijakan bisa membantu variasi basis ekonomi wilayah. Masing-masing strategi ini memiliki tingkat risiko berbeda, antara lain:

1. jangkauan industri melibatkan perluasan hubungan ke depan dan ke belakang untuk menambah rangkaian nilai wilayah;
2. pengaruh industri melibatkan kolaborasi industri dengan sektor perindustrian lain di mana ada kemungkinan besar sinergi bisnis

berdasarkan potensi pengembangan wilayah di wilayah yang belum pernah di sentuh (*white space*); serta

3. jangkauan dan pengaruh industri melibatkan kombinasi satu industri atau lebih dalam penambahan nilai dan pengembangan wilayah yang belum pernah disentuh (*white space development*).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

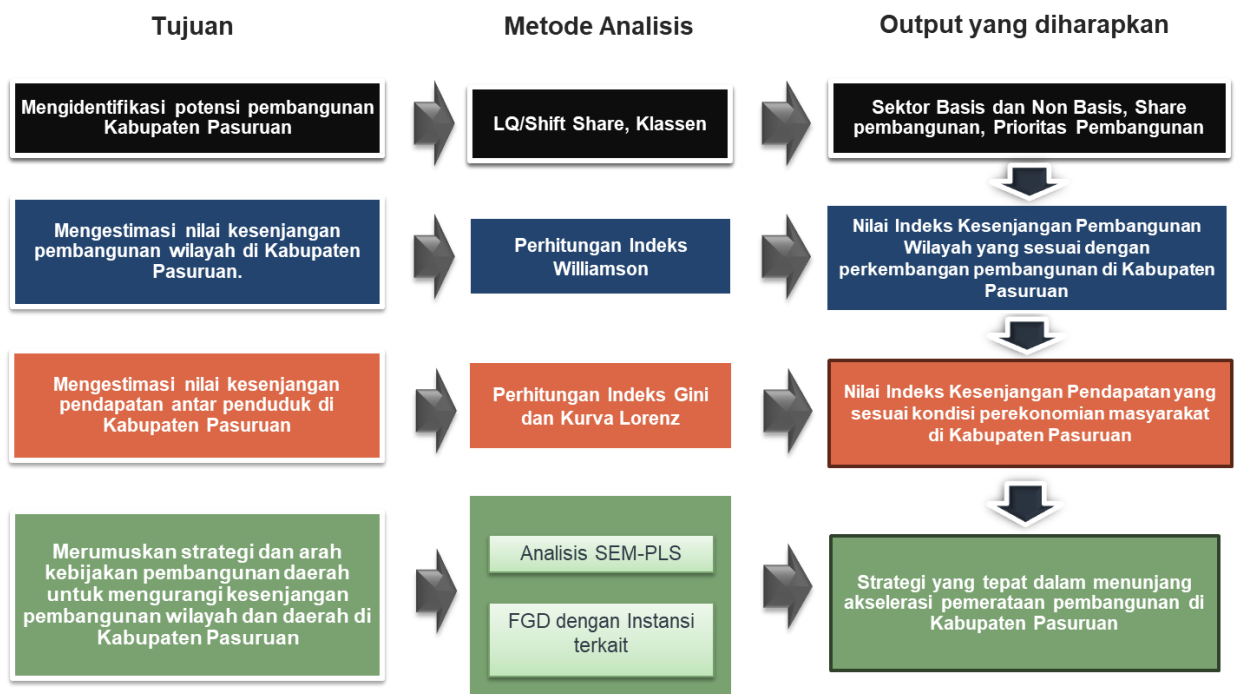
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam pelaksanaan kajian ini menggabungkan pendekatan kuantitatif yang diperkuat dengan pendekatan kualitatif. Secara umum pendekatan yang digunakan adalah pendekatan holistik, integratif, tematik, dan spasial (HITS), yaitu pendekatan yang menyentuh seluruh aspek permasalahan dan melibatkan seluruh pihak yang terkait dalam melihat akar permasalahan dan menyusun solusi penyelesaiannya.

Dalam mencapai **tujuan pertama**, pendekatan penelitian yang digunakan adalah **pendekatan kuantitatif** dengan menggunakan data sekunder, yaitu data PDRB berdasarkan lapangan usaha Kabupaten Pasuruan. Untuk **tujuan kedua**, pendekatan penelitian yang digunakan adalah **pendekatan kuantitatif** dengan menggunakan data sekunder, khususnya data-data indikator makro Kabupaten Pasuruan yang berupa data PDRB per kapita per kecamatan dan jumlah penduduk per kecamatan. Selanjutnya, **tujuan ketiga** dapat dicapai dengan menggunakan pendekatan yang sama dengan tujuan pertama, yaitu **pendekatan kuantitatif**, dengan menggunakan data-data pengeluaran makanan dan non makanan per rumah tangga penduduk per kecamatan di Kabupaten Pasuruan. Kemudian untuk mencapai **tujuan keempat**, menggunakan **pendekatan kuantitatif yang diperkuat dengan pendekatan kualitatif** untuk mengetahui penyebab kesenjangan pembangunan berdasarkan persepsi masyarakat Kabupaten Pasuruan, yang berdasarkan penyebab kesenjangan pembangunan tersebut, dirumuskan strategi atau upaya untuk menurunkan kesenjangan pembangunan di Kabupaten Pasuruan.

Dengan penyusunan strategi yang sesuai dengan penyebab permasalahan yang ditemukan langsung di lapang, diharapkan implementasi dari kebijakan pembangunan di Kabupaten Pasuruan akan lebih tepat sasaran dan solutif.

3.2. Diagram Alir Penelitian

Dalam pelaksanaan tahapan penelitian, disusun diagram alir yang dapat menunjukkan langkah-langkah analisis yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun diagram alir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar 3. 1 Tahapan Penelitian

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini dipilih sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut: (1) untuk mengidentifikasi potensi pembangunan Kabupaten Pasuruan, menggunakan analisis ekonomi regional; (2) untuk mengestimasi angka kesenjangan wilayah di Kabupaten Pasuruan, menggunakan analisis Indeks Williamson; (3) untuk mengestimasi angka

kesenjangan pendapatan di Kabupaten Pasuruan menggunakan analisis perhitungan Indeks Gini dan Kurva Lorentz; dan (4) untuk menyusun strategi kebijakan dalam mengatasi kesenjangan di Kabupaten Pasuruan dilakukan dengan menggunakan analisis SEM-PLS yang kemudian diolah kembali untuk mengetahui posisi kebijakan yang akan diterapkan dalam kuadran IFAS-EFAS. Adapun output dari keseluruhan hasil analisis data dalam penelitian ini adalah terwujudnya pemerataan pembangunan di Kabupaten Pasuruan.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa data persepsi masyarakat yang diperoleh dari hasil survey primer pada sample masyarakat di masing-masing kecamatan di Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya adalah jenis data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat, BPS Jawa Timur, BPS Kabupaten Pasuruan, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan, dan dinas-dinas terkait lainnya. Untuk mendukung ketersediaan data yang lebih lengkap, sumber data juga diakses melalui publikasi artikel maupun makalah/jurnal ilmiah dari internet.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Seperti halnya jenis data yang digunakan dalam penelitian, terdapat 2 (dua) teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu melalui: (i) survey sekunder pada instansi terkait dengan melakukan interaksi melalui email dan website; serta (ii) survey primer untuk mengetahui secara langsung respon masyarakat Kabupaten

Pasuruan terkait dengan kesenjangan wilayah. Adapun data sekunder utama yang digunakan dalam proses analisis data adalah, (a) data Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pasuruan selama lima tahun terakhir; (b) Data Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Kecamatan di Kabupaten Pasuruan; (3) data jumlah penduduk per kecamatan di Kabupten Pasuruan selama lima tahun terakhir; (4) data pengeluaran rumah tangga, baik makanan dan non makanan, penduduk Kabupaten Pasuruan; (5) data program yang sudah dan akan dilaksanakan pemerintah daerah terkait dengan permasalahan kesenjangan wilayah; serta (6) data-data spasial Kabupaten Pasuruan.

3.5. Data-data yang Dibutuhkan

Dalam melakukan analisis data, dibutuhkan beberapa data-data *time series* dan *cross section* dengan kebutuhan data sebagai berikut.

Tabel 3. 1 Kebutuhan Data Sekunder dan Sumber Data

No	Kebutuhan Data	Sumber Data
1	RTRW Kabupaten Pasuruan	BAPPELITBANGDA
2	PDRB per kecamatan Kabupaten Pasuruan (2020-2024)	BPS
3	Jumlah penduduk per kecamatan Kabupaten Pasuruan (2020-2024)	BPS
4	Pengeluaran makanan dan non makanan rumah tangga penduduk Kabupaten Pasuruan (2020-2024)	BPS
5	Dokumen Perencanaan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Stretagi Penurunan Kesenjangan (RPJMD atau Renstra).	BAPPELITBANGDA

Sumber : Hasil Pemikiran, 2025

3.6. Metode Analisis.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan hasil yang ingin dicapai dalam masing-masing tujuan penelitian yang telah ditentukan

pada bagian sebelumnya. Berdasarkan tujuan tersebut, maka secara terperinci, berikut adalah metode analisis yang digunakan.

3.6.1. Indeks Williamson

Indeks Williamson (IW) adalah ukuran disparitas pendapatan antar daerah yang pertama kali dikembangkan oleh Jeffrey G Williamson. Pada tahun 1965, Williamson meneliti hubungan disparitas daerah dengan tingkat pembangunan ekonomi. IW dapat dipergunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan antar kab/kota yang terjadi di suatu provinsi (Sjafrizal 2008). Formula Indeks Williamson dapat dituliskan:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (r_i - \bar{r})^2 \frac{x_i}{n}}}{\bar{r}}$$

di mana r_i menunjukkan PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku di daerah i , $\bar{r}$ adalah rata-rata PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku daerah sedangkan x_i jumlah penduduk di daerah i dan n jumlah penduduk daerah keseluruhan.

Menurut Permendagri No 54 Tahun 2010, bahwa kriteria Indeks Williamson adalah sebagai berikut:

- a. $IW < 0,5$ terklasifikasi sebagai disparitas rendah;
- b. $IW \geq 0,5$ terklasifikasi sebagai disparitas tinggi.

3.6.2. Koefisien Gini

Koefisien Gini (KG) adalah ukuran disparitas pendapatan penduduk yang pertama kali dikembangkan oleh statistikawan Italia Corrado Gini. KG dinyatakan

dalam bentuk rasio yang nilainya antara 0 dan 1. Secara matematis KG adalah perbandingan luas antara daerah yang terletak di antara garis diagonal dan kurva

Lorenz (ditandai A) dengan luas segitiga (ditandai A dan B) sehingga $KG = \frac{A}{(A+B)}$.

Selanjutnya rumus perhitungan koefisien Gini adalah sebagai berikut.

$$GC = 1 - \sum_{i=1}^n (X_i - X_{i-1})(Y_i + Y_{i-1})$$

Dimana:

GC = Gini Coefficient (Gini Rasio)

X_i = Persentase jumlah penduduk ke-i

Y_i = persentase jumlah pendapatan penduduk kumulatif ke-i

Menurut Permendagri No 54 Tahun 2010, bahwa kriteria dari Koefisien Gini adalah sebagai berikut:

- a. $KG < 0,3$ terklasifikasi sebagai disparitas rendah;
- b. $0,3 \leq KG \leq 0,5$ terklasifikasi sebagai disparitas sedang;
- c. $KG > 0,5$ terklasifikasi sebagai disparitas tinggi.

3.6.3. Kurva Lorentz

Kurva Lorenz, yaitu suatu kurva yang memperlihatkan hubungan kuantitatif antara persentase kumulatif pendapatan dengan persentase kumulatif populasi penduduk selama waktu tertentu. Bentuk kurva Lorenz menunjukkan derajat ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan. Semakin dekat kurva Lorenz dengan garis diagonal 45° atau garis pemerataan, maka semakin merata distribusi pendapatan (Perkin et al. 2001).

Fungsi Lorenz didefinisikan sebagai fungsi $L:[0,1] \rightarrow \mathcal{R}$ dengan y = pendapatan setiap penduduk, z = quantil pendapatan, $F(z)$ = proporsi penduduk dengan pendapatan $y \leq z$, $f(z) = F'(z)$ adalah fungsi kepekatan peluang, $f(y)dy \cong$ proporsi penduduk dengan pendapatan pada interval $[y, y + dy]$, dan $\bar{y} = \int_0^\infty y f(y)dy$ adalah rata-rata pendapatan. Sehingga Fungsi Lorenz didefinisikan sebagai berikut (Groth, 2008):

$$P = F(z) \Rightarrow L(P) = \frac{\int_0^z y f(y)dy}{\bar{y}}$$

3.6.4. Analisis SEM PLS (*Structural Equation Modeling – Partial Least Squares*)

Untuk mengetahui penyebab kesenjangan wilayah di Kabupaten Pasuruan digunakan pendekatan kuantitatif dengan metode *Structural Equation Modeling* berbasis *Partial Least Squares* (SEM-PLS). Metode ini dipilih karena mampu menganalisis hubungan kausal yang kompleks antara variabel laten (konstrak) yang terdiri atas beberapa indikator terukur. SEM-PLS juga sesuai digunakan pada penelitian eksploratif dengan ukuran sampel relatif kecil dan data yang tidak berdistribusi normal.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh faktor sumber daya alam dan sumber daya ekonomi terhadap kesenjangan wilayah di Kabupaten Pasuruan, serta mengidentifikasi faktor dominan yang mempengaruhi disparitas antar kecamatan. Adapun variable dependen (konstruk endogen) dalam penelitian ini adalah Kesenjangan Wilayah (X_3) yang diukur melalui indikator dukungan pemerintah, dan variabel laten (konstruk eksogen) yang terdiri dari variable berikut:

Tabel 3. 2 Variabel Eksogen dalam Kesenjangan Wilayah Kabupaten Pasuruan

No	Variabel	Sub Variabel
1	Keterisolasian Geografis (X_1)	Keterisolasian Geografis ($X_{1.1}$)
		Potensi Alam Desa/Kel ($X_{1.2}$)
		Jenis Guna Lahan ($X_{1.3}$)
		Akses Menuju Sarana Kesehatan ($X_{1.4}$)
		Akses Menuju Sarana Pendidikan ($X_{1.5}$)
		Akses Birokrasi ($X_{1.6}$)
		Akses Air Bersih ($X_{1.7}$)
		Akses Informasi ($X_{1.8}$)
		Akses Pasar ($X_{1.9}$)
		Jalan ($X_{1.10}$)
		Air Bersih ($X_{1.11}$)
2	Sumberdaya Ekonomi (X_2)	Jumlah Penduduk Usia Produktif ($X_{2.1}$)
		Jumlah Pengangguran ($X_{2.2}$)
		Tingkat Pendidikan ($X_{2.3}$)
		Skill ($X_{2.4}$)
		Penggunaan Teknologi Modern ($X_{2.5}$)
		Inovasi ($X_{2.6}$)
		Jaringan Pemasaran ($X_{2.7}$)
		Informasi Pasar ($X_{2.8}$)
		Kemitraan dengan Pihak Lain ($X_{2.9}$)
3	Implementasi Program (X_4)	Kondisi Fisik Kesehatan ($X_{4.1}$)
		Kondisi Non Fisik Kesehatan ($X_{4.2}$)
		Kondisi Fisik Pendidikan ($X_{4.3}$)
		Kondisi Non Fisik Pendidikan ($X_{4.4}$)

Sumber: Penelitian Terdahulu.

Selanjutnya, tahapan penelitian yang dilakukan dalam analisis SEM-PLS adalah sebagai berikut.

a. Langkah 1: Spesifikasi Model

- Menetapkan *measurement model (outer model)* yang menghubungkan indikator-indikator teramati dengan konstruk laten (faktor dan variabel).
- Menetapkan *structural model (inner model)* yang menunjukkan hubungan kausal antar konstruk laten dengan fokus pada penjelasan terhadap kesenjangan wilayah.

- b. Langkah 2: Persiapan Data
 - Memeriksa kualitas data: validitas, reliabilitas, normalitas, serta keberadaan *missing values*.
 - Melakukan *exploratory factor analysis* bila diperlukan.
- c. Langkah 3: Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)
 - Menilai *convergent validity* dengan kriteria **Average Variance Extracted (AVE) > 0,5**.
 - Menilai *composite reliability* > 0,7.
 - Menilai *discriminant validity* menggunakan kriteria **Fornell-Larcker** atau **HTMT ratio**.
- d. Langkah 4: Evaluasi Model Struktural (Inner Model)
 - Menganalisis *path coefficients* (arah dan kekuatan hubungan antar variabel).
 - Mengevaluasi **R-squared** (variasi yang dijelaskan) untuk konstruk endogen.
 - Melakukan analisis *predictive relevance (Q-squared)* dan *effect size (f²)*.
 - Menggunakan **bootstrapping** (misal 5.000 subsampel) untuk menguji signifikansi statistik (nilai *t* dan *p*).
- e. Langkah 5: Penyempurnaan Model
 - Berdasarkan hasil analisis, model dapat disesuaikan kembali (misalnya dengan menghapus indikator yang lemah).
 - Melakukan validasi ulang untuk memastikan keandalan model akhir.

f. Langkah 6: Interpretasi dan Pelaporan

- Menginterpretasikan jalur hubungan signifikan untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama penyebab kesenjangan wilayah.
- Menganalisis pengaruh langsung dan tidak langsung dari faktor sumber daya alam dan sumber daya ekonomi.
- Menyusun rekomendasi kebijakan pembangunan wilayah untuk mengurangi kesenjangan.

Metode **SEM-PLS** memungkinkan analisis secara komprehensif terhadap faktor-faktor multidimensi yang memengaruhi kesenjangan wilayah, dengan memanfaatkan struktur variabel yang telah dirancang secara rinci.

3.6.5. Analisis Deskriptif Interpretatif

Metode deskriptif merupakan suatu metode analisis yang digunakan untuk menggambarkan segenap fakta atau karakteristik dari populasi tertentu secara sistematis, aktual, dan cermat (Arikunto, 1998). Dalam penelitian ini, metode deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi karakteristik kesenjangan pembangunan di Kabupaten Pasuruan serta menginterpretasikan hasil pengolahan data dengan menggunakan analisis faktor.

3.6.6. Analisis IFAS-EFAS

Metode ini merupakan salah satu metode analisis *development* yang bersifat kuantitatif dalam artian bahwa keempat faktor SWOT masing-masing dianalisis berdasarkan komponen dari tiap faktor untuk selanjutnya diberikan penilaian untuk mengetahui posisi obyek penelitian pada kuadran SWOT. Adapun sistem penilaian yang dilakukan adalah memberikan penilaian dalam bentuk tabel kepada dua

kelompok besar yaitu faktor internal (IFAS/ *Internal Factor Analysis Summary*) yang terdiri dari kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) serta faktor eksternal (EFAS/ *External Factor Analysis Summary*) yang terdiri dari peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*).

1) **Tabel IFAS**

Cara-cara penyusunan tabel IFAS (*Internal Factor Analysis Summary*) adalah sebagai berikut:

- Kolom I disusun 5-10 faktor-faktor kekuatan dan kelemahan
- Tiap faktor dalam kolom II diberi faktor mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting)
- Rating dihitung untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (*outstanding*) sampai dengan 1 (*poor*) berdasarkan pengaruh tersebut terhadap perkembangan desa tertinggal. Variabel yang bersifat positif (semua variabel yang masuk kategori kekuatan) diberi nilai mulai dari +1 sampai dengan +4 (sangat baik) dengan membandingkannya dengan rata-rata variabel lain. Jika kelemahan tiap variabel di desa tertinggal besar sekali dibandingkan dengan rata-rata variabel lainnya, nilainya adalah 4, sedangkan jika kelemahannya dibawah rata-rata, nilainya adalah 1.
- Penentuan rating dalam tabel IFAS, dapat menggunakan hasil dari analisis faktor yang menggunakan metode *Principal Component Analysis*. Berdasarkan pengertiannya, penentuan rating dapat menggunakan *Eigen Values/Characteristic Roots* yang menunjukkan hasil pengukuran keragaman seluruh variabel yang digunakan. Jika terdapat faktor yang memiliki *eigen value* rendah, maka faktor tersebut hanya memberikan sedikit

sekali sumbangan dalam menjelaskan keragaman variabel dan dapat diabaikan sebagai suatu kelebihan dari faktor-faktor yang lebih penting. *Eigen values* mengukur jumlah keragaman dalam keseluruhan sampel yang diuraikan oleh setiap faktor (www.en.wikipedia.org). *Eigen values* yang dihasilkan dalam analisis faktor kemudian diintervalkan untuk mendapatkan nilai rating yang sesuai.

- Penentuan nilai bobot juga dapat dilakukan dengan menggunakan hasil analisis faktor yaitu component scores. Component scores merupakan nilai dari setiap variabel dalam masing-masing faktor. Untuk memperhitungkan nilai faktor untuk suatu variabel dalam suatu faktor, digunakan nilai baku dari masing-masing variabel, yaitu hasil pengkuadratan dari masing-masing nilai variabel dalam masing-masing faktor, yang kemudian dijumlahkan untuk masing-masing variabelnya (www.en.wikipedia.org). Nilai faktor tersebut yang digunakan sebagai nilai bobot dalam tabel IFAS.
- Bobot dikalikan dengan rating untuk memperoleh faktor pembobotan
- Skor pembobotan dijumlahkan untuk memperoleh total skor pembobotan

2) ***Tabel EFAS***

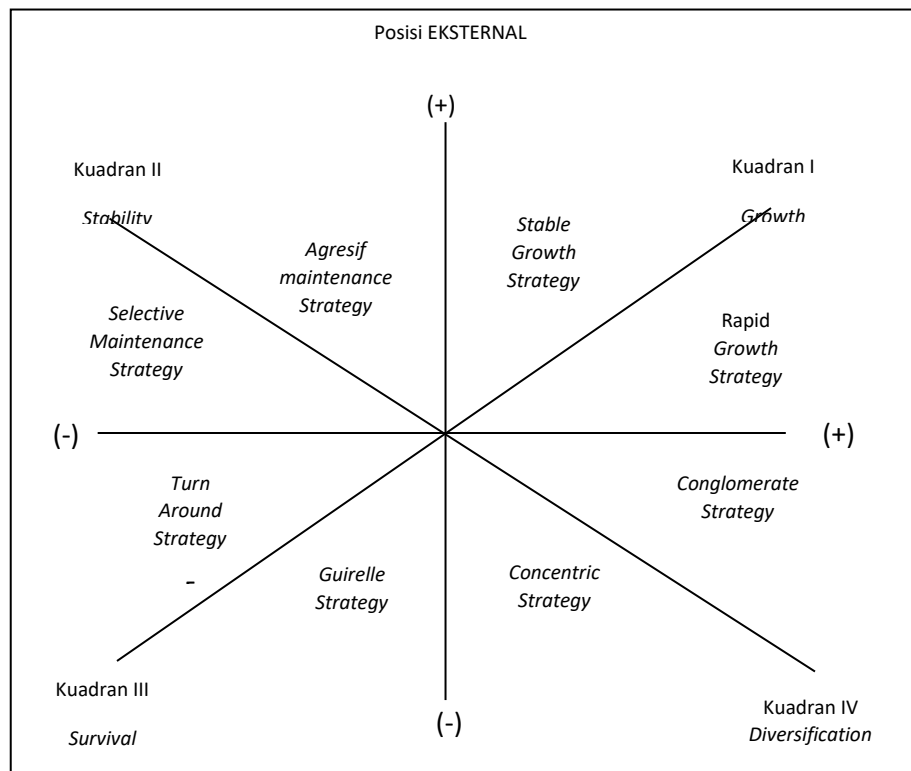
Cara-cara penyusunan tabel EFAS (*External Factor Analysis Summary*) adalah sebagai berikut:

- Kolom I disusun 5-10 faktor-faktor peluang dan ancaman
- Tiap faktor dalam kolom II diberi faktor mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting)
- Rating dihitung untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (*outstanding*) sampai dengan 1 (*poor*) berdasarkan pengaruh tersebut

terhadap perkembangan desa tertinggal. Variabel yang bersifat positif (semua variabel yang masuk kategori peluang) diberi nilai mulai dari +1 sampai dengan +4 (sangat baik) dengan membandingkannya dengan rata-rata sektor ekonomi atau variabel lain. Jika ancaman variabel desa tertinggal besar sekali dibandingkan dengan rata-rata variabel lainnya, nilainya adalah 4, sedangkan jika ancamannya dibawah rata-rata, nilainya adalah 1.

- Sama halnya dengan penentuan rating dalam tabel IFAS, penentuan rating dalam tabel EFAS dapat menggunakan *Eigen values* yang dihasilkan dalam analisis faktor, yang kemudian diintervalkan untuk mendapatkan nilai rating yang sesuai.
- Penentuan nilai bobot juga dapat dilakukan dengan menggunakan hasil analisis faktor yaitu dengan hasil pengkuadratan dari masing-masing nilai variabel dalam masing-masing faktor, yang kemudian dijumlahkan untuk masing-masing variabelnya. Nilai faktor tersebut yang digunakan sebagai nilai bobot dalam tabel EFAS.
- Bobot dikalikan dengan rating untuk memperoleh faktor pembobotan
- Skor pembobotan dijumlahkan untuk memperoleh total skor pembobotan

Adapun untuk lebih jelasnya, kuadran dalam analisis IFAS EFAS dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.2. Diagram IFAS-EFAS

Adapun sistem penilaian yang dilakukan adalah memberikan penilaian dalam bentuk matrik kepada dua kelompok besar yaitu faktor internal (IFAS/ *Internal Factor Analysis Summary*) yang terdiri dari kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) serta faktor eksternal (EFAS/ *External Factor Analysis Summary*) yang terdiri dari peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threaten*). Dari penilaian berdasarkan IFAS dan EFAS diketahui posisi obyek penelitian dalam koordinat pada sumbu x dan y, sehingga diketahui posisinya sebagai berikut (Yoeti, 1996):

1. Kuadran I (*Growth*), adalah kuadran pertumbuhan dimana pada kuadran ini terdiri dari dua ruang, yaitu:
 - a. Ruang A dengan *Rapid Growth Strategy*, yaitu strategi pertumbuhan aliran cepat untuk diperlihatkan pengembangan secara maksimal untuk target tertentu dan dalam waktu singkat.

- b. Ruang B dengan *Stable Growth Strategy*, yaitu strategi pertumbuhan stabil dimana pengembangan dilakukan secara bertahap dan target disesuaikan dengan kondisi.
- 2. Kuadran II (*Stability*), adalah kuadran pertumbuhan dimana pada kuadran ini terdiri dari dua ruang, yaitu:
 - a. Ruang C dengan *Agresif Maintenance Strategy* dimana pengelola obyek melaksanakan pengembangan secara aktif dan agresif.
 - b. Ruang D dengan *Selective Maintenance Strategy* dimana pengelolaan obyek dengan pemilihan hal-hal yang dianggap penting.
- 3. Kuadran III (*Survival*), adalah kuadran pertumbuhan dimana pada kuadran ini terdiri dari dua ruang, yaitu:
 - a. Ruang E dengan *Turn Around Strategy*, yaitu strategi bertahan dengan cara tambal sulam untuk operasional obyek.
 - b. Ruang F dengan *Guirille Strategy*, yaitu strategi gerilya, sambil operasional dilakukan, diadakan pembangunan pemecahan masalah dan ancaman.
- 4. Kuadran IV (*Diversification*), adalah kuadran pertumbuhan dimana pada kuadran ini terdiri dari dua ruang, yaitu:
 - a. Ruang G dengan *Concentric Strategy* dimana strategi pengembangan obyek dilakukan secara bersamaan dalam satu koordinasi oleh satu pihak.
 - b. Ruang H dengan *Conglomerate Strategy* dimana strategi pengembangan masing-masing kelompok dengan cara koordinasi tiap sektor.

3.7. Rencana Kerja Pelaksanaan Kegiatan.

NO	PROGRAM KERJA	METODE	Bulan 1				Bulan 2			
			1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyempurnaan TOR melalui verifikasi substansi antara pelaksana dengan penanggungjawab kegiatan	- Diskusi antara BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan dengan tim pelaksana dari Universitas Brawijaya								
2	Penyusunan Konsep Penelitian	- Disukusi Internal Tim Pelaksana								
3	Penyusunan Proposal dan Strategi Penelitian	- Kajian literature - Check list ketersediaan data yang ada - Penyusunan kerangka penelitian - Review proposal - Penyusunan outline penelitian								
4	Pengumpulan data awal	- Dokumentasi dan tabulasi data sekunder yang bersumber dari koleksi data yang dimiliki dan internet								
6	Laporan Pendahuluan	- Penyusunan Laporan Bab 1 hingga Bab 4 berdasarkan data sekunder dan hasil pengolahan data awal								
7	Pengumpulan data sekunder	- Survey sekunder (instansi) - Penyusunan deskripsi data sekunder								
9	Kompilasi Data Sekunder	- Review hasil pengumpulan data - Penyusunan data yang sudah didapatkan dan siap olah								
10	Pengolahan Data	- Analisis data dengan menggunakan metode perhitungan Indeks Williamson, Indeks Gini dan analisi faktor								
11	Penulisan hasil interpretasi data dan	- Interpretasi hasil pengolahan data								

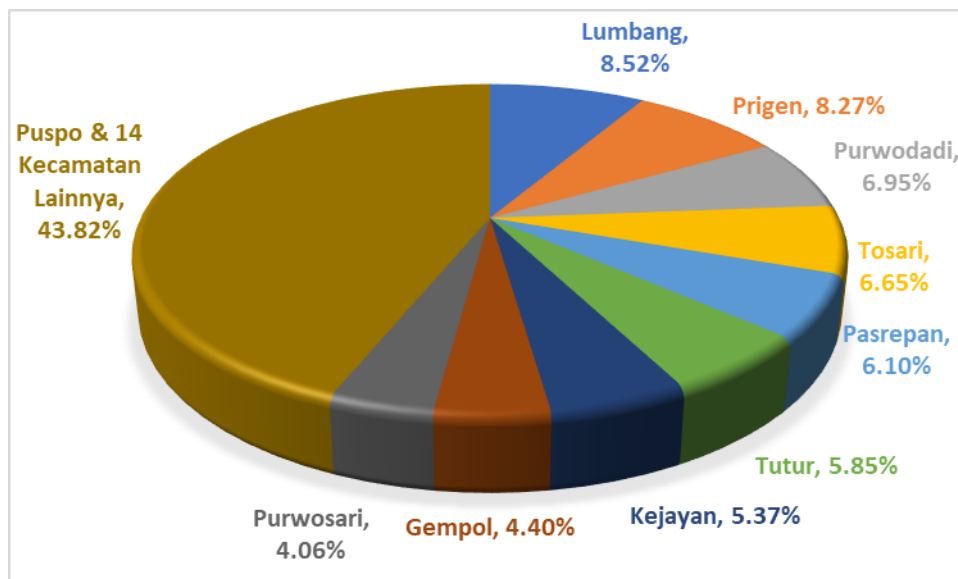
NO	PROGRAM KERJA	METODE	Bulan 1				Bulan 2			
			1	2	3	4	1	2	3	4
	pembahasan	- Pembahasan hasil berdasarkan tinjauan Pustaka dan kondisi eksisting								
12	Evaluasi dan Diskusi	- Evaluasi kegiatan - Diskusi internal penulisan laporan								
13	Penulisan Draft Laporan Akhir	- Analisa data - Diskusi internal hasil analisis - Penyusunan draft laporan akhir sesuai dengan outline								
14	Seminar Hasil / <i>Public Discussion</i> / FGD (Daring/offline)	- Persiapan Diskusi - Diskusi hasil dan pembahasan akhir dengan BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan								
15	Revisi dan Review Laporan Akhir	- Revisi laporan sesuai dengan hasil FGD								
16	Publikasi / Pencetakan Hasil Penelitian	- Pencetakan Laporan Akhir - Penyerahan Laporan Akhir								

BAB IV

GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN PASURUAN

4.1. Aspek Geografis

Kabupaten Pasuruan memiliki wilayah yang cukup luas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dapat diketahui bahwa Kabupaten Pasuruan memiliki luas wilayah 1.474,02 km² atau 3,08% dari luas Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, Kabupaten Pasuruan terdiri dari 24 Kecamatan yang terbagi atas 24 kelurahan dan 341 desa. Adapun proporsi luas wilayah dari masing-masing kecamatan di Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut.

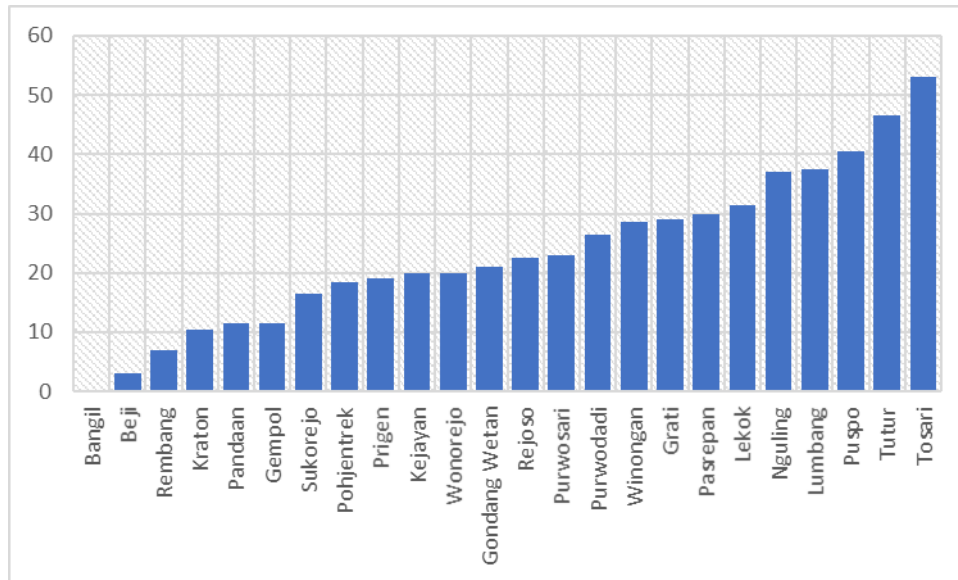


Sumber: BPS, 2025

Gambar 4.1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Pasuruan.

Wilayah kecamatan yang terluas di Kabupaten Pasuruan adalah Kecamatan Lumbang, dengan proporsi sebesar 8,52% dari total luas wilayah Kabupaten Pasuruan (125,55 km²). Wilayah kecamatan yang terluas selanjutnya adalah Kecamatan Prigen (121,9 km²), Kecamatan Purwodadi (102,46 km²), Tosari (98

km²), Pasrepan (89,95 km²), Tutur (86,3 km²), Kejayan (79,15 km²), Gempol (64,92 km²), dan Purwosari (59,87 km²).



Sumber: BPS, 2025

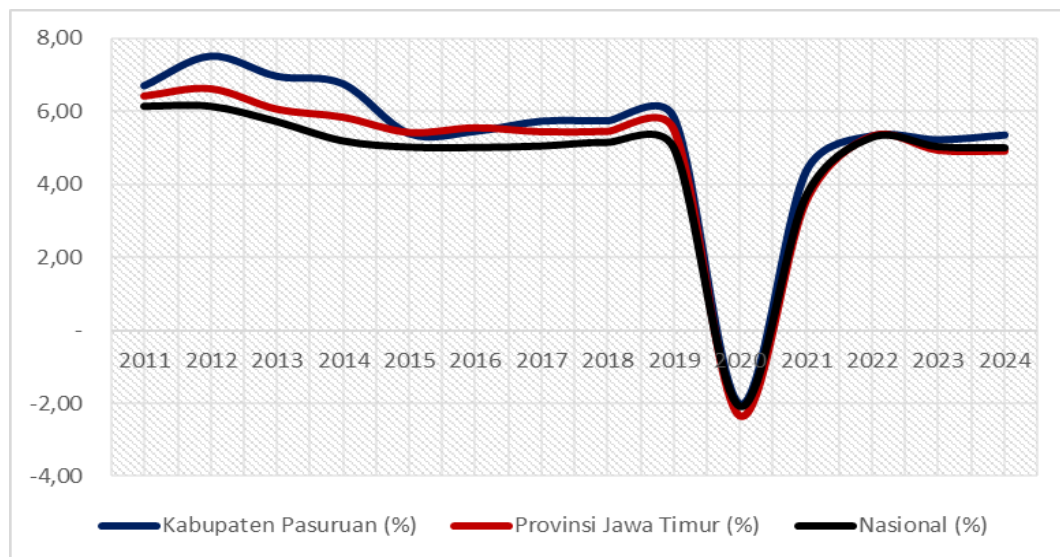
Gambar 4.2 Jarak Wilayah Kecamatan ke Pusat Wilayah Kabupaten Pasuruan.

Pusat wilayah Kabupaten Pasuruan adalah Kecamatan Bangil. Hal tersebut mengingat Kecamatan Bangil merupakan wilayah kecamatan dengan fasilitas ekonomi dan sosial yang terlengkap jika dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Pasuruan. Sedangkan wilayah kecamatan yang terjauh dari pusat wilayah Kabupaten Pasuruan adalah wilayah Kecamatan Tosari dengan jarak sejauh 53 km dari pusat wilayah Kabupaten Pasuruan. Kecamatan Tosari merupakan kecamatan dengan jenis topografi pegunungan yang memiliki ketinggian wilayah lebih dari 1.000 mdpl.

4.2. Aspek Perekonomian.

4.2.1. Perkembangan Makro Ekonomi Kabupaten Pasuruan.

Kabupaten Pasuruan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat baik. Hal tersebut nampak berdasarkan trend laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan yang hampir selalu berada di atas laju pertumbuhan Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

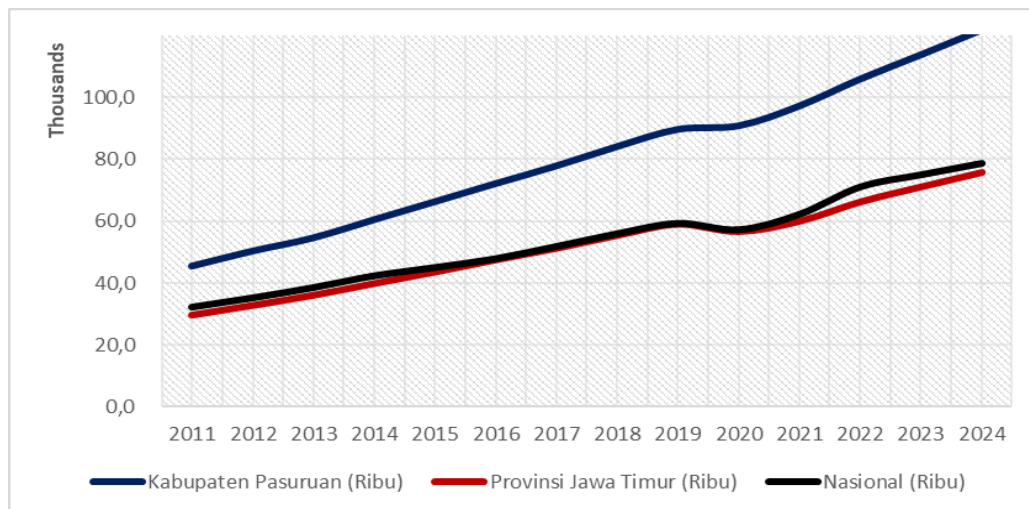


Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Gambar 4.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional, 2011 – 2024

Kabupaten Pasuruan memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang sangat baik. Pada tahun 2011, laju pertumbuhan Kabupaten Pasuruan adalah sebesar 6.69%. Angka tersebut mengalami fluktuasi dengan kecenderungan yang menurun hingga angka 5,38% pada tahun 2015. Selanjutnya, pada tahun 2016 hingga 2019 cenderung mengalami sedikit peningkatan hingga menjadi angka 5.83%. Pada tahun 2020, sama halnya dengan yang terjadi di seluruh wilayah di dunia, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan yang sangat signifikan hingga menjadi -2.03%, namun masih tetap berada di atas Tingkat pertumbuhan ekonomi

Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan berangsur pulih dan kembali mengalami peningkatan hingga 5.32% pada tahun 2022, dan sedikit menurun menjadi 5.21% pada tahun 2023. Namun pada tahun 2024, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan yang cukup baik, hingga di angka 5,34%, berbeda halnya dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional yang sama-sama mengalami sedikit penurunan. Hal tersebut mengindikasikan **Kabupaten Pasuruan telah berhasil mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerahnya (hingga 0,13% jika dibandingkan tahun 2023), lebih cepat dari beberapa wilayah lain yang bahkan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi daerah.**



Sumber: BPS, 2025 (diolah)

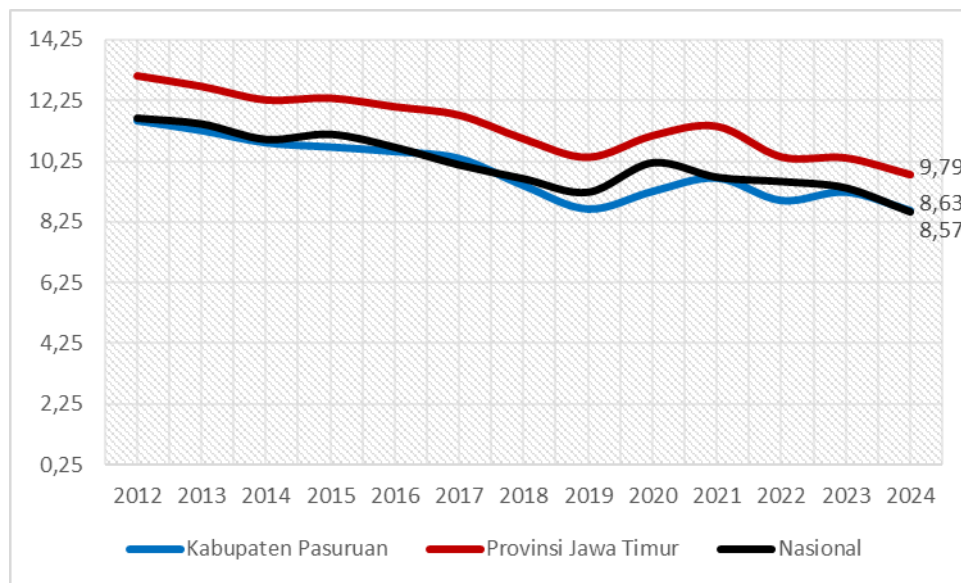
Gambar 4.4 Perkembangan Pendapatan Per Kapita Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional, 2011 – 2024

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Pasuruan cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Jawa Timur, dan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat dikemukakan berdasarkan data BPS yang menunjukkan bahwa pada tahun 2011 hingga 2024, nilai PDRB per kapita Kabupaten Pasuruan selalu berada di atas nilai PDRB per

kapita Jawa Timur dan Nasional. Pada tahun 2010, nilai PDRB per kapita Kabupaten Pasuruan adalah sebesar 40,342 juta rupiah. Angka tersebut terus mengalami peningkatan yang stabil dan signifikan hingga menjadi 89,580 juta rupiah pada tahun 2019. Pada tahun 2020 angka tersebut tetap mengalami peningkatan meskipun tidak sebanyak peningkatan pada tahun-tahun sebelumnya (yaitu sebesar 1,3%). Pada tahun selanjutnya hingga tahun 2023, angka pendapatan per kapita Kabupaten Pasuruan kembali mengalami peningkatan yang cukup besar hingga menjadi 113,682 juta rupiah, atau sebesar 159.84% jika dibandingkan dengan nilai PDRB per kapita Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2024, pendapatan per kapita Kabupaten Pasuruan kembali mengalami peningkatan yang cukup besar hingga menjadi 121,689 juta rupiah. Angka tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan Jawa Timur (75,77 juta rupiah) dan Nasional (78,617 juta rupiah) Artinya, **Kabupaten Pasuruan memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat dan tingkat produktivitas serta daya beli masyarakat yang tinggi.**

4.2.2. Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Pembangunan Wilayah Kabupaten Pasuruan.

Selain dari angka pertumbuhan ekonomi dan nilai PDRB per kapitanya, kondisi makro ekonomi Kabupaten Pasuruan juga dapat dilihat berdasarkan angka kemiskinan, seperti yang tersaji pada gambar berikut.



Sumber: BPS, 2025

Gambar 4.5. Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional, 2012-2024

Angka kemiskinan Kabupaten Pasuruan memiliki kecenderungan yang menurun, dan tetap selalu berada di bawah angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan data perkembangan angka kemiskinan Kabupaten Pasuruan yang selalu mengalami penurunan dari tahun 2012 hingga 2019 (dari 11.58% menjadi 8.68%). Pada tahun 2019 hingga 2020, angka kemiskinan Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan hingga menjadi 9.7%, dimana hal tersebut memang terjadi di seluruh wilayah Indonesia mengingat terjadinya pandemi. Namun pada tahun berikutnya, angka kemiskinan Kabupaten Pasuruan berhasil kembali mengalami penurunan (menjadi 8.96% pada tahun 2022), dan kembali menurun menjadi 8.63 pada tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Pasuruan masih relatif sangat rendah jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di daerah lain di Provinsi Jawa Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2011. *Data Penduduk Jawa Barat dari Tahun ke Tahun*. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistika.
- Cowell F. 2009. *Measuring Inequality*. London: Oxford University Press.
- Goul L. 2003. *Matemathical Definition of the Gini Index*. Washington: University of Washington.
- Groth C. 2008. The Gini Index of Inequality. London : *The Journal of Economic Inequality*.
- Harry S. 2008. *Inter-Regional Inequality in Indonesia*. Jakarta (ID): Universitas Indonesia.
- Lessmann C. 2011. *Regional Inequality and Decentralization*. Dresden: Technische Universitat Dresden.
- Perkin. Reinhardt U. Epstein R. 2001. The Construct Of Lorenz Curves And Of The Gini-Coefficient. Prisceton : Prisceton University.
- Prayitno H. 1996. *Ekonomika Pembangunan*. Jakarta (ID): Ghalia Indonesia
- Sastradipoera K. 1989. *Kegunaan Konsep Koefisien Gini dan Konsep Kesenjangan Pendidikan dalam Pemerataan Kesempatan Pendidikan*. Bandung (ID): Angkasa.
- Skryzhevskya Y. 2000. *Inequalities of Regional Development in Ukraine: Causes. Consequenses. and Prospects*. Oxford: Miami University.
- Sumaryanto. 1977. *Struktur Penguasaan Tanah di Daerah Lampung*. Jakarta (ID): Balai Pustaka.
- Syafrizal. 2008. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasinya*. Jakarta (ID): Grasindo.
- Szal R. 1977. *Measuring Income Inequality*. London: The Brooking Institution.
- Tarigan R. 2008. *Ekonomi Regional*. Jakarta (ID): PT Bumi Aksara.
- Wong F T. 2001. *Aplikasi Statistik Ekstrem dan Simulasi Monte Carlo dalam Penentuan Beban Rencana pada Struktur dengan Umur Guna Tertentu*. Surabaya (ID) : Universitas Kristen Petra.